



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019

tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 178).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024

Pasal I

Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,
SEKRETARIAT DAERAH
BOGOR
ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I
NIP. 19800507 200312 1 003



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I	PENDAHULUAN 3
1.1	Latar Belakang 3
1.2	Landasan Hukum 5
1.3	Maksud dan Tujuan 9
1.4	Sistematika Penulisan 10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA..... 11
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah..... 30
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 50
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 120
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 122
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... 122
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 129
3.3	Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023..... 137
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 139
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda..... 142
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN..... 144
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 144
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 148
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 151
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 298
BAB VIII	PENUTUP..... 312

2 DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bappeda.....	32
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	35
Tabel 2.3. Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bappeda.....	36
Tabel 2.4. Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	39
Tabel 2.5. Keadaan Pegawai Menurut Golongan.....	39
Tabel 2.6. Tabel Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Bogor sampai dengan Tahun 2021.....	40
Tabel 2.7. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bappeda.....	46
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor Tahun 2018-2022.....	52
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Bogor.....	81
Tabel 2.10. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019.....	98
Tabel 2.11. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020.....	106
Tabel 2.12. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021.....	111
Tabel 3.1. Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah.....	127
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	134
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	137
Tabel 3.4. Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bappeda Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.....	142
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	146
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	149
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019.....	152
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020.....	163
Tabel 6.3. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021.....	173
Tabel 6.4. Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kota Bogor.....	195
Tabel 6.5. Perubahan Program Unggulan Bappeda Kota Bogor.....	255
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	299
Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bappeda Kota Bogor.....	306

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran lebih lanjut substansi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. Renstra Bappeda disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang diatur dalam pasal 11 bagian kedua tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Renstra merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai petunjuk agar semua program dan kegiatan Perangkat Daerah selaras untuk mencapai tujuan yang mengarah pada Visi Kota Bogor yaitu “Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

- a) Adanya perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merubah Nomenklatur dan Kodefikasi mulai dari Urusan sampai dengan Sub Kegiatan sehingga wajib untuk disesuaikan dalam perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) Hasil evaluasi internal atas Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan perlu dilakukan penyesuaian indikator
-

kinerja program dan target program sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dengan adanya *refocussing*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 Kota Bogor diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Perubahan Renstra kemudian menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bogor Tahun 2022-2024 untuk mempercepat pencapaian indikator dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) (SWOT) yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Bogor yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA “

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan:

- 1) persiapan penyusunan;
 - 2) penyusunan rancangan awal;
 - 3) penyusunan rancangan
 - 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
 - 5) Perangkat Daerah;
 - 6) perumusan rancangan akhir; dan
 - 7) penetapan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan menengah daerah yang saling menjamin keselarasan upaya pencapaian target Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Bappeda dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) /Peraturan Wali Kota Bogor.
-

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
-

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - 15) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 - 16) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - 17) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
-

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 - 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 - 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
-

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

- 28) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 - 29) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 - 30) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 - 31) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
 - 32) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
 - 33) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019- 2024;
 - 34) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
 - 35) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144);
 - 36) Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor;
-

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah :

Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

- b. Tujuan dari Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Penyesuaian/Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Bappeda Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
 - 2) Memberikan pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2022-2024);
 - 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
-

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Bappeda Kota Bogor 2019-2024 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Terhadap Rensta Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

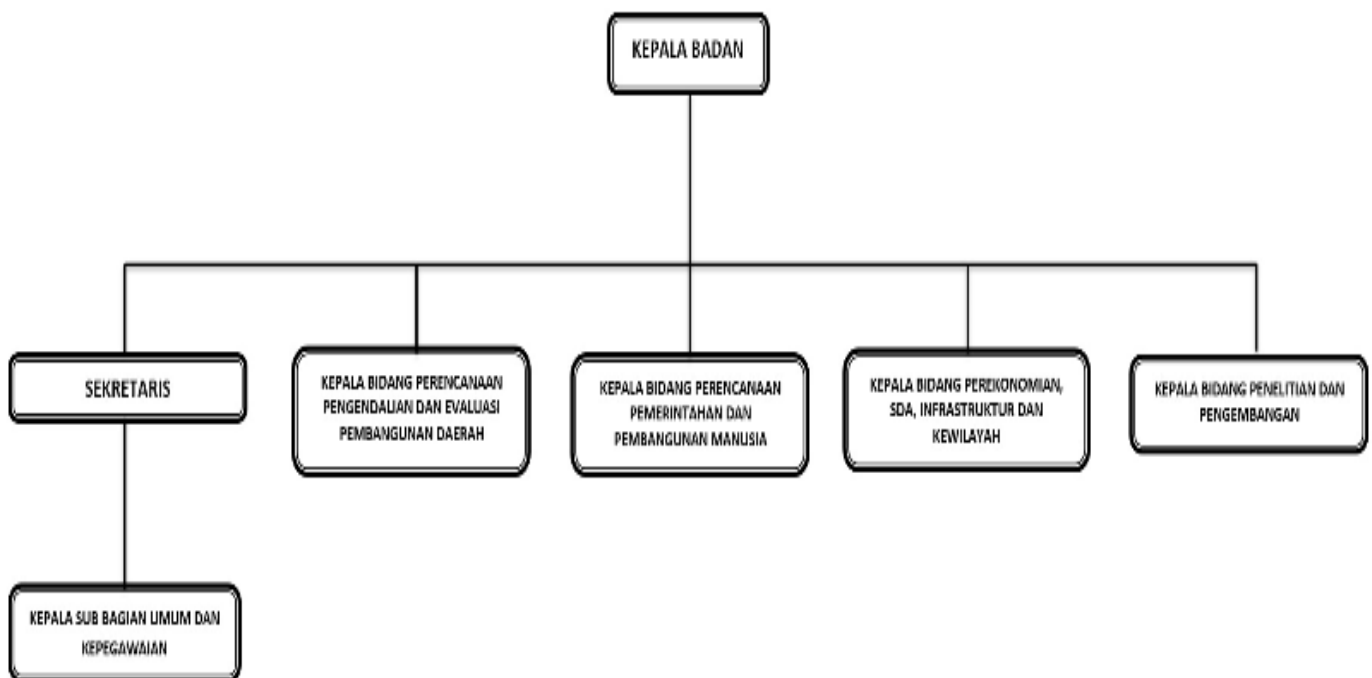
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Kelompok Substansi Bagian Keuangan;
 3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Kelompok Substansi Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
 4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pemerintahan Umum;
 - b. Kelompok Substansi Pemerintahan Wilayah;
 - c. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
 5. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Kelompok Substansi Infrastruktur;
 - c. Kelompok Substansi Kewilayahan;
-

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - b. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Bagan berikut :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan :

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan

Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. mendistribusikan pekerjaan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya
-

Tugas Teknis:

1. merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 2. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
 3. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 4. merumuskan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, tahunan dan penelitian dan pengembangan;
 5. mengoordinasikan dan menganalisa lebih lanjut perumusan perencanaan Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 6. mengoordinasikan tugas proses perencanaan di Bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 7. menganalisa aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian dan pengembangan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah serta masyarakat dalam wilayah Kota Bogor dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kota;
 8. menyusun RKPD/Rancangan APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 9. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan RTRW Daerah dengan RPJMD;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja/program perencanaan pembangunan daerah;
 11. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lainnya di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian, serta pengembangan yang bersifat makro;
 12. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian, serta pengembangan;
 13. mengarahkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
-

14. melaksanakan tugas selaku Pengguna Anggaran meliputi:

- a) menyusun RKA-SKPD Badan;
- b) menyusun DPA-SKPD Badan;
- c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d) melaksanakan anggaran Badan;
- e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan;
- k) mengawasi pelaksanaan anggaran Badan;
- l) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m) menetapkan pejabat lainnya lingkup Badan dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n) menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- o) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- p) menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
- q) menyusun dokumen pemberian hibah bantuan sosial;
- r) menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; dan
- s) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

15. melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang meliputi:

- a) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah lingkup Badan;
 - b) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
-

- c) melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d) menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - g) menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 - h) mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - i) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - j) menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
16. melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan dokumen SOP, dan penyusunan SKM pada Badan;
 17. menetapkan perjanjian kinerja lingkup Badan; dan
 18. merumuskan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Badan.
-

2. Sekretaris :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Badan;
- b. pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Badan;
- c. pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Badan; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Badan

Tugas Manajerial:

1. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kelompok Substansi Keuangan dan Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
6. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

Tugas Teknis:

1. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran, penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan Badan dan Sekretariat;
 2. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset, dan kerumahtanggaan;
 3. mengoordinasikan penghimpunan data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
-

5. mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian, serta pengembangan;
 6. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
 7. mengoordinasikan bidang-bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 8. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan RTRW daerah dengan RPJMD
 9. melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
 10. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a) verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan Surat Perintah Membayar;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e) menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 11. melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang meliputi:
 - a) menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - b) meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c) meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - d) menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
-

- e) mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 - f) menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g) meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang;
 - h) memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penyimpanan;
 - i) meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
 - j) melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik Daerah;
 - k) meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna;
12. mengoordinasikan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan daerah, dan penelitian, serta pengembangan seizin Wali Kota;
 13. mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, gaji, dan tunjangan penghasilan pegawai;
 14. mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Badan, dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran;
 15. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu lingkup Badan;
 16. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan pemeriksaan;
 17. mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, dan SKM Badan;
 18. mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Badan;
 19. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Badan.
-

3. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah melaksanakan Tusi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

a. Tugas Manajerial :

1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang meliputi Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan, Kelompok Substansi Data dan Informasi, serta Kelompok Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 5. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 6. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pendanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah;
-

7. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 8. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 9. mengoordinasikan penyelarasan tujuan, sasaran, dan program yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah dengan tujuan, sasaran, dan program yang tertuang dalam perencanaan perangkat daerah;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan analisa, pengkajian, dan penyelarasan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, serta mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah;
 11. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah untuk didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi;
 12. mengoordinasikan pengelolaan serta analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 13. mengoordinasikan pemanfaatan analisa data dan informasi dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 14. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 15. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 16. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan penyampaian usulan rekomendasi tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 17. mengoordinasikan penyusunan pelaporan hasil pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja rencana pembangunan daerah;
 18. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengharmonisasikan RTRW daerah dengan RPJMD;
 19. meneliti dan menganalisa RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 20. mengoordinasikan penyelarasan kebutuhan pendanaan untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersumber non anggaran pemerintah;
 21. mengoordinasikan pelaksanaan validasi atau verifikasi data pembangunan bersama instansi terkait;
-

22. menyusun konsep data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
23. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pengamanan, pendokumentasian data dan informasi, serta bahan hasil analisis pemanfaatan data dan informasi yang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
24. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi berwenang terkait penyediaan data pokok pembangunan daerah;
25. mengoordinasikan penyusunan data dan informasi profil pembangunan daerah serta mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media;
26. mengoordinasikan kajian dan analisa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD periode berikutnya;
27. mengoordinasikan rencana tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah dan capaian kinerja Perangkat Daerah;
28. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penyusunan ukuran kinerja Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah dan capaian kinerja Perangkat Daerah; dan
29. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja pembangunan daerah.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
-

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- a. Tugas Manajerial:
- 1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi Kelompok Substansi Pemerintahan Umum, Kelompok Substansi Pemerintahan Wilayah, serta Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
 - 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 - 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
- b. Tugas Teknis:
- 1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 5. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - 6. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
-

7. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 8. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rancangan APBD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 9. mengoordinasikan penyusunan rencana yang setingkat dengan rencana induk yang terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 10. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 11. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 12. menyusun dan mengevaluasi serta merumuskan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah sehubungan dengan pencapaian target kinerja dalam RPJMD, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 13. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 14. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 15. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antar Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga; dan
 16. meneliti dan menganalisa RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
-

5. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- a. Tugas Manajerial:
1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan yang meliputi Kelompok Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kelompok Substansi Infrastruktur, dan Kelompok Substansi Kewilayahan;
 2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan; dan
 8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;
-

b. Tugas Teknis :

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 4. mengoordinasikan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 5. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 9. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 10. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 11. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RAPBD lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 12. mengoordinasikan penyusunan rencana yang setingkat dengan Rencana Induk yang terkait Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 13. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 14. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
 15. menyusun dan mengevaluasi serta merumuskan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah sehubungan dengan pencapaian target kinerja dalam RPJMD, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
-

16. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
17. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
18. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan antar Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementerian/Lembaga;
19. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan RTRW daerah dengan RPJMD; dan
20. meneliti dan menganalisa RKA-SKPD dan DPA-SKPD Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusunan rencana kerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- a. Tugas Manajerial:
1. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, serta Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
-

2. mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
3. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
4. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
5. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
6. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
7. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;

b. Tugas Teknis:

1. merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian kinerja lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 3. mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 4. mengoordinasikan penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 5. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, perumusan, pengoordinasian, penelitian, dan pengembangan di Pemerintah Daerah Kota;
 6. mengoordinasikan pengkajian kebijakan lingkup urusan bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
 7. mengoordinasikan fasilitasi serta penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
 8. mengoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 9. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Daerah Kota;
 10. mengoordinasikan, sinkronisasi, dan kerja sama pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah Kota;
 11. mengoordinasikan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
-

12. mengoordinasikan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
13. meneliti dan menganalisa RKA-SKPD dan DPA-SKPD lingkup Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
14. mengoordinasikan pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
15. mengoordinasikan pengukuran indeks inovasi daerah, indeks daya saing daerah, serta indeks pengelolaan keuangan daerah;
16. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif serta difusi hasil-hasil kemitraan;
17. melaksanakan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
18. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
19. melaksanakan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, pembinaan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Badan; dan
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- a. Tugas Manajerial:
1. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 4. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 5. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
-

6. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lainnya;.

Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas :

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
6. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
7. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
8. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Bappeda Kota Bogor memiliki 44 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 orang Tenaga Non ASN, terkait dengan hal tersebut, kondisi kepegawaian Bappeda Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kualitas dan

kuantitas dapat dikatakan kurang memadai, terutama untuk Jabatan Analisis Perencanaan, pengelola bahan perencanaan, dan verifikator data laporan keuangan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2021 jumlah pegawai (ASN/Non ASN) Bappeda Kota Bogor sebanyak 56 orang. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Bappeda Kota Bogor dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel : 2.1.

Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bappeda

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Desember tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala	1	0	0	0	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	1	0
3	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan	1	0	0	0	0	0	0
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	1	0	0	1	0	2	0
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	1	2	0	2	0
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0	0	0	1	0
4.1	Analisis SDM Aparatur	2	0	0	0	0	2	0
4.2	Pengadministrasi Umum	0	0	1	2	0	3	0
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	0	0	2	0	2	0
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	0	0	0	0	1	0
5.1	Bendahara	1	0	0	0	0	1	0
5.2	Pengelola Keuangan	1	0	0	0	0	1	0
5.3	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	1	1	0	1	0
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	0	0	0	0	1	0
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan	1	0	0	0	0	1	0
7.1	Pengolah Data	0	0	1	1	0	2	0
7.2	Analisis Perencanaan Anggaran	1	0	0	1	0	2	0
8	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	1	0	0	0	0	1	0
8.1	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	0	0	0	1	0
8.2	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	0	0	1	1	0	2	0
9	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	1	0	0	0	0	1	0
9.1	Analisis Data dan Informasi	0	0	0	0	0	1	0
9.2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1	2	0	2	0
10	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	1	0	0	0	0	1	0
11	Kepala Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1	0
11.1	Pengelola Geospasial	0	0	0	1	0	1	0
11.2	Analisis Tata Ruang	0	0	0	1	0	1	0
11.3	Analisis Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1	0
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	0	1	0
12.1	Analisis Penataan Kawasan	1	0	0	0	0	1	0
12.2	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	0	0	0	1	0	1	0
12.3	Pengelola Perumahan dan Permukiman	0	0	0	2	0	2	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Desember tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur	1	0	0	0	0	1	0
13.1	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2	0	0	0	0	2	0
13.2	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	0	0	0	0	1	0
13.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
14	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0	0	0	1	0
15	Kepala sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	1	0	0	0	0	1	0
15.1	Analisis Perencanaan Strategis	1	0	0	0	0	1	0
15.2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0	0	0	1	0	1	0
15.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya	1	0	0	0	0	1	0
16.1	Analisis Sosial Budaya	1	0	0	0	0	1	0
16.2	Analisis Perencanaan	1	0	0	0	0	1	0
16.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	1	0	0	0	0	1	0
17.1	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	0	0	0	2	0	2	0
17.2	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1	0	0	0	0	1	0
17.3	Analisis Perencanaan	0	0	0	1	0	1	0
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	0	0	1	0
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	0	0	0	0	1	0
19.1	Analisis Penelitian dan Pengembangan	2	0	0	0	0	2	0
19.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	1	0	0	0	0	1	0
20.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	1		2	
20.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2		2	
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	1	0	0	0	0	1	0
21.1	Analisis Perekonomian	1	0	0	0	0	1	0
21.2	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	0	0	0	2	0	2	0
22	Perencana		0	0		0		0
22.1	Ahli Madya Perencana	1	0	0	2	0	3	0
22.2	Ahli Pertama Perencana	1	0	0	4	0	5	0
22.3	Ahli Muda Perencana	4	0	0	3	0	7	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Desember tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
22.4	Peneliti Muda	0	0	0	3	0	3	0

Menurut tingkat pendidikannya (ASN/Non ASN) terdiri dari, 3 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 2 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 26 orang berpendidikan Sarjana (S-1), 24 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2) dan 1 orang Doktor (S3). Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai perencana. sesuai dengan Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Doktor (Strata 3)	1	
2	Pasca Sarjana (Strata 2)	24	
3	Sarjana (Strata 1)	26	
4	D3	2	
5	SMA	3	
6	SMP	-	
7	SD	-	
Jumlah		56	

Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.

Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bappeda

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d November tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala		1				
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		1	1			
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan			1	1		
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan				1		
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1				
4.1	Analisis SDM Aparatur				1		
4.2	Pengadministrasi Umum				1		
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		
5	Kepala Sub Bagian Keuangan		1				
5.1	Bendahara				1		
5.2	Pengelola Keuangan				1		
5.3	Verifikator Data Laporan Keuangan						
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1				
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan		1				
7.1	Pengolah Data				1		
7.2	Analisis Perencanaan Pembangunan				1		
8	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan		1				
8.1	Analisis Perencanaan				1		
8.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
9	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi		1				
9.1	Analisis Data dan Informasi				1		
9.2	Pengelola Bahan Perencanaan				1		
10	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah		1				
11	Kepala Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup		1				
11.1	Pengelola Geospasial						
11.2	Analisis Tata Ruang						
11.3	Analisis Lingkungan Hidup				1		

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d November tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman		1				
12.1	Analisis Penataan Kawasan				1		
12.2	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan						
12.3	Pengelola Perumahan dan Permukiman						
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur		1				
13.1	Analisis Pengembangan Infrastruktur				2		
13.2	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
13.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
14	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1				
15	Kepala sub Bidang Perencanaan Pemerintahan		1				
15.1	Analisis Perencanaan Strategis				1		
15.2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan						
15.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya		1				
16.1	Analisis Sosial Budaya				1		
16.2	Analisis Perencanaan				1		
16.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat		1				
17.1	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan						
17.2	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat				1		
17.3	Analisis Perencanaan						
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan		1				
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1				
19.1	Analisis Penelitian dan Pengembangan				2		
19.2	Pengelola Bahan Perencanaan						
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan		1				
20.1	Analisis Perencanaan				1		
20.2	Pengelola Bahan Perencanaan						

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d November tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan		1				
21.1	Analisis Perekonomian				1		
21.2	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian						
22	Perencana						
22.1	Ahli Madya Perencana						
22.2	Ahli Pertama Perencana				1		
22.3	Ahli Muda Perencana				1		
22.4	Peneliti Muda						

Keadaan pegawai (ASN/Non ASN) menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 29 orang (51,79%) laki-laki dan 27 orang (48,21%) perempuan.

Tabel 2.4.

Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	29	51,79%
2	Perempuan	27	48,21%
Jumlah		56	100%

Keadaan pegawai (ASN) menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor golongan IV (10) yang paling banyak golongan III (31), sedangkan untuk golongan II (3)

Tabel 2.5

Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan I	-	
2	Golongan II	3	
3	Golongan III	31	
4	Golongan IV	10	
Jumlah		44	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Bappeda Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

[illegible]

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja Bappeda maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat di capai pendaan guna barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bappeda

No	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan									
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024	
	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Tanah Gedung Bappeda		1.200 m		-		-		-		-		-		-		-	
2	Bangunan Gedung Bappeda		1.083 m	1.083 m	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	589 m²	589 m²	800 m²	800 m²	800 m²	800 m²	800 m²	800 m²
3	Kendaraan roda 4		10 unit	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kendaraan roda 2		21 unit	21 unit	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lemari besi/arsip		14 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
6	Filing cabinet besi		45 unit	45 unit	-	-	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Filing cabinet kayu		2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rak besi		2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Penghancur kertas		4 unit	4 unit	-	-	2 unit	2 unit	-	-	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	-	-	-	-
10	White board		2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Lemari kayu		8 unit	8 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lemari Buku		10 unit	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Buffet kaca		-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kursi kerja		52 unit	52 unit	-	-	-	-	-	-	6 unit	6 unit	-	-	-	-	-	-

N o	Nama Barang		Jumlah Kondisi Saat Ini						Jumlah Rencana Pengadaan									
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Berat		2020		2021		2022		2023		2024	
	Awal	Perubaha n	Awal	Perubaha n	Awa l	Perubaha n	Awa l	Perubaha n	Awal	Perubaha n	Awa l	Perubaha n	Awa l	Perubaha n	Awa l	Perubaha n	Awa l	Perubaha n
51	Sepeda		-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Mesin tik manual		-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Mesin tik elektrik		5 unit	5 unit	-	-	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Microwave		2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Karpet		200 m	200 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	gorden		160 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 m	200 m	-	-
57	Videotron		-	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Kunci Pintu Digital		1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota dan Kecamatan;
 5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kota;
 6. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
 7. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;
 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
 9. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 10. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN;
-

11. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
12. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil laporan kinerja PD se-Kota Bogor;
13. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta promosi daerah skala kota;
14. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha ditingkat kota;
15. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
16. Merumuskan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
17. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
18. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Pelayanan Badan Perangkat daerah Kota Bogor dapat di ukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan seiring misi yang di miliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kota Bogor.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, terdapat indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor
Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Indikator Tujuan Bappeda																			
1	Prosentase Keselarasan antara Program Pembangunan daerahdan RPJMD				-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
2	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap kinerja perencanaan pembangunan daerah				-	3,4	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Nilai AKIP BAPPEDA				-	A	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	80	-	-	-

[illegible]

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	
Indikator Sasaran Bappeda																			
10	Persentase Keselarasan antara Renstra /Renja Bappeda dengan RPJMD/RKPD				-	100	-	-	-	-	77,78	-	-	-	-	77,78	-	-	-
11	Persentase Keselarasan antara perencanaan sektoral (masterplan/rencana induk/rencana aksi) dengan RPJMD/RKPD				-	97	-	-	-	-	94,22	-	-	-	-	97,13	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				-	97	-	-	-	-	61,11	-	-	-	-	63	-	-	-
13	Persentase indikator kinerja program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				-	97	-	-	-	-	71,15	-	-	-	-	73,35	-	-	-
14	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD				-	80	-	-	-	-	84	-	-	-	-	105	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
15	Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota				-	30	-	-	-	-	30,43	-	-	-	-	101,43333	-	-	-
16	Nilai AKIP Bappeda				-	A	-	-	-	-	BB	-	-	-	-	80	-	-	-
17	Persentase tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,Inspektorat propinsi dan atau inspektorat kota				-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
18	Indeks Inovasi Daerah				-	-	601-610	611-620	-	-	-	5162	57,8	-	-	-	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
19	Kategori Inovasi Daerah				-	-	-	-	Inovatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan				-	-	5,2	10,5	50	-	-	7	60	-	-	-	134,62	571,43	-
21	Indeks Kualitas Kebijakan				-	-	-	-	Sedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD				-	-	10	10	-	-	-	10	8,88	-	-	-	100,00	88,80	-
23	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk				-	-	6	7	-	-	-	11	18	-	-	-	183,33	257,14	-

[illegible]

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
28	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	
Indikator Program																			
29	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD				95	100	-	-	-	95	77,78	-	-	-	100	77,78	-	-	-
30	Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD				95	100	-	-	-	95	100	-	-	-	100	100	-	-	-
31	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD				95	100	-	-	-	95	90	-	-	-	100	90	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
32	Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD				100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
33	Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP				88	90	-	-	-	80,5	88,67	-	-	-	91,48	98,52	-	-	-
34	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP		Ada / tidak		27	30	-	-	-	4,3	48,21	-	-	-	15,93	160,7	-	-	-
35	Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev		100		100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
36	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP		4 milyar		3,5 milyar	4 milyar	-	-	-	2,19	4,91	-	-	-	62,57	122,75	-	-	-
37	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR		10		8	10	-	-	-	10	40,62	-	-	-	125	406,2	-	-	-
38	Dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik		97		95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-
39	Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)			97	95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
40	jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data			9016	8766	9016	-	-	-	9016	9016	-	-	-	102,85	100	-	-	-
41	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD			97	95	97	-	-	-	95	93	-	-	-	100	95,88	-	-	-
42	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD			97	95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
43	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD			90	90	90	-	-	-	80	-	-	-	-	88,89	-	-	-	-
44	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD			97	95	97	-	-	-	90	93	-	-	-	94,74	95,88	-	-	-
45	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				95	97	-	-	-	66,67	61,11	-	-	-	70,18	63	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
46	Persentase indikator kinerja program Prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				95	97	-	-	-	82,46	71,15	-	-	-	86,8	73,35	-	-	-
47	Persentase ketercapaian indikator program penataan ruang				90	95	-	-	-	80	100	-	-	-	88,89	105,26	-	-	-
48	Persentase usulan mastarakat yang terakomodir dalam APBD				75	80	-	-	-	75	86	-	-	-	100	107,5	-	-	-
49	Ratio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang				1:10000	1:10000	-	-	-	1:10000	3:10000	-	-	-	100	300	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
50	Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang				25	30	-	-	-	25	31,75	-	-	-	100	93,33	-	-	-
51	Jumlah inovasi masyarakat yang telah diinventarisir				40	60	-	-	-	44	46	-	-	-	110	76,67	-	-	-
52	Peresentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota				30	30	-	-	-	100	32,61	-	-	-	333,33	208,7	-	-	-
53	Jumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat				3	3	-	-	-	12	20	-	-	-	400	666,67	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
54	Nilai LKIP Perangkat Daerah				83	84	-	-	-	72,89	100	-	-	-	87,8	119,05	-	-	-
55	Jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan				100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
56	Jumlah kampung tematik/kampung wisata				-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-	100	100,00	-
57	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan				-	-	5,2	10,5	10,5	-	-	7	60	-	-	-	134,61	571,43	-
58	Jumlah hasil kelitbangan				-	-	10	10	10	-	-	117	143	-	-	-	1170	1430	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
59	Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.				-	-	7	7	7	-	-	7	68	-	-	-	100	971,43	-
60	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang				-	-	20:100	22:100	25:100	-	-	25:100	31:100	-	-	-	113,64	124	-
61	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang				-	-	1:100	2:100	3:100	-	-	1:100	2:100	-	-	-	100	100	-
62	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk				-	-	6	7	8	-	-	11	18	-	-	-	183,33	257,14	-
63	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD				-	-	10	10	15	-	-	10	8,88	-	-	-	100	88,80	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
64	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota				-	-	22	23	24	-	-	23,35	23,75	-	-	-	106,13	103,26	-
65	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD				-	-	73	78	80	-	-	77,83	79,17	-	-	-	106,61	101,50	-
66	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD				-	-	73	79	80	-	-	77,83	79,17	-	-	-	106,61	100,22	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
67	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD				-	-	73	77	80	-	-	77,83	79,17	-	-	-	106,61	102,82	-
68	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan				-	-	90	90	95	-	-	100	100	-	-	-	111,11	111,11	-
69	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR				-	-	10	10	10	-	-	19,34	26,02	-	-	-	193,4	260,20	-
70	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah				-	-	80	85	90	-	-	65,72*	74,91*	-	-	-	82,15	88,13	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
71	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah				-	-	BB	BB	A	-	-	BB	A	-	-	-	100	100,00	-
72	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti				-	-	90	90	95	-	-	100	100	-	-	-	111,11	111,11	-
73	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100,00	-
74	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				-	-	80	85	90	-	-	80	100	-	-	-	100	117,65	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
75	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD				-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100,00	-
76	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD				-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
Indikator Kinerja Utama (IKU)																			
77	Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)			97	95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
78	jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data			9016	8766	9016	-	-	-	9016	9016	-	-	-	102,85	100	-	-	-
79	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD			97	95	97	-	-	-	95	93	-	-	-	100	95,88	-	-	-
80	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD			97	95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-

[illegible]

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
85	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			80,01	-	-	-	-	80,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti				-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-	111,11	111,11	-
87	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD			100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
88	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti				-	-	90	90	-	-	-	100	100	-	-	-	111,11	111,11	-
89	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00	-
90	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur				-	-	80	85	-	-	-	80	100	-	-	-	100,00	117,65	-
Indikator Kinerja Kunci (IKK)																			

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
91	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP		Ada / tidak		27	30	-	-	-	4,3	48,21	-	-	-	15,93	160,7	-	-	-
92	Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev		Ada / tidak		100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
93	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP		Ada / tidak		3,5 milyar	4 milyar	-	-	-	2,19	4,91	-	-	-	62,57	122,75	-	-	-
94	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR		10		8	10	-	-	-	10	40,62	-	-	-	125	406,2	-	-	-
95	Dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik		Ada / tidak		95	97	-	-	-	95	100	-	-	-	100	103,09	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
96	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada		-	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-
97	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		ada		-	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-
98	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		ada		-	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-
99	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		ada		-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
100	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100		-	100	100	100	100	-	100	95,61	100	-	-	100	95,61	100,00	-
101	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100		-	100	100	100	100	-	100	97,28	100	-	-	100	97,28	100,00	-
102	Kesesuaian rencana Pembangunan dengan RTRW		100		-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100,00	-	-
103	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		1		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-
104	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		1		-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	100	100,00	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
105	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		2		-	2	2	2	2	-	2	2	2	-	-	100	100,00	100,00	-
106	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		1		-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	100	100,00	-	-
107	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		100		-	100	100	-	-	-	90	96,1	-	-	-	90	96,1	-	-
108	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD		100		-	100	100	-	-	-	98	97,25	-	-	-	98	97,25	-	-
109	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100		-	100	100	-	-	-	93	100	-	-	-	93	100	-	-
110	Persentase implementasi rencana kelitbangan		100		-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-
111	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		100		-	100	100	100	-	-	100	75	100	-	-	100	75	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
112	Penerapan SIDA : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		85		-	73,68	75	77,5	-	-	73,68	100	100	-	-	100	133,33	129,03	-
113	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		100		-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-

Tabel 2.9.[illegible]

[illegible]

[illegible]

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Program Pengendalian Pembangunan Daerah																				
Kegiatan Upgreeding Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota	187.300.000	-	-	-	-	-	175.285.100	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	187.300.000	175.285.100
Kegiatan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	-	12.100.000	-	-	-	-	-	12.100.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	12.100.000	12.100.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																				
Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang	907.255.000	-	-	-	-	-	873.558.650	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	907.255.000	873.558.650
Program Perencanaan Pembangunan Daerah																				
Kegiatan Perencanaan Umum	279.600.000	-	-	-	-	-	224.091.000	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	279.600.000	224.091.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penyusunan perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan	544.700.000	-	-	-	-	-	514.415.100	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-	-	544.700.000	514.415.100
Kegiatan Penyusunan RPJMD 2020-2025	481.156.200	-	-	-	-	-	469.300.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	481.156.200	469.300.000
Program Penelitian dan Pengembangan																				
Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2018	236.250.000	168.150.000	-	-	-	-	233.040.000	147.635.500	-	-	-	-	99	88	-	-	-	-	202.200.000	190.337.750
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-	470.000.000	-	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.000.000	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	233.842.000	-	880.000.000	-	-	-	230.223.000	-	-	-	-	-	98	-	-	-	556.921.000	230.223.000
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	101.290.000	150.000.000	220.000.000	253.000.000	-	-	101.095.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	181.072.500	101.095.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	132.552.000	-	-	-	-	-	129.128.000	-	-	-	-	-	97	-	-	-	132.552.000	129.128.000
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1.012.415.400	700.000.000	1.260.000.000	400.000.000	-	-	998.144.005	-	-	-	-	-	99	-	-	-	843.103.850	998.144.005
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	600.135.400	-	-	-	-	-	587.599.005	-	-	-	-	-	98	-	-	-	600.135.400	587.599.005
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	412.280.000	-	-	-	-	-	410.545.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	412.280.000	410.545.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	250.560.000	810.000.000	620.000.000	475.000.000	-	-	241.342.000	-	-	-	-	-	96	-	-	-	538.890.000	241.342.000
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	-	-	225.560.000	-	-	-	-	-	217.492.000	-	-	-	-	-	96	-	-	-	225.560.000	217.492.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	25.000.000	-	-	-	-	-	23.850.000	-	-	-	-	-	95	-	-	-	25.000.000	23.850.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kajian Lingkup Bidang Ekonomi	-	129.875.000	-	-	-	-	-	129.685.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	129.875.000	129.685.000
Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	-	176.226.000	-	-	-	-	-	169.374.200	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	176.226.000	169.374.200
Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	-	108.927.400	-	-	-	-	-	107.067.400	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	108.927.400	107.067.400
Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																				
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	25.127.000	170.075.000	-	-	-	-	23.861.600	167.910.000	-	-	-	-	95	99	-	-	-	-	97.601.000	95.885.800
Program Pelayanan Administrasi perkantoran																				
Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga OPD	2.957.319.100	1.777.936.180	-	-	-	-	2.598.361.361	1.282.098.810	-	-	-	-	88	72	-	-	-	-	2.367.627.640	1.940.230.086
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																				
Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor	648.000.000	515.850.000	-	-	-	-	544.485.420	514.450.350	-	-	-	-	84	100	-	-	-	-	581.925.000	529.467.885

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	891.250.000	654.920.000	-	-	-	-	854.333.517	481.138.500	-	-	-	-	96	73	-	-	-	-	773.085.000	667.736.009
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah																				
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	751.729.000	785.000.000	1.875.000.000	2.130.000.000	-	-	711.314.060	-	-	-	-	-	95	-	-	-	1.385.432.250	711.314.060
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	-	-	413.320.000	400.000.000	800.000.000	1.000.000.000	-	-	397.580.400	-	-	-	-	-	96	-	-	-	653.330.000	397.580.400
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	-	-	-	110.000.000	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	-	-	-	50.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	256.209.000	260.000.000	915.000.000	950.000.000	-	-	255.377.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	595.302.250	255.377.000

[illegible]

[illegible]

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah																				
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	45.890.000	1.000.000.000	150.000.000	365.000.000	-	-	45.490.000	-	-	-	-	-	99	-	-	-	390.222.500	45.490.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	3.150.000	-	-	-	-	-	3.150.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	3.150.000	3.150.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	16.000.000	-	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	16.000.000	16.000.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	26.740.000	-	-	-	-	-	26.340.000	-	-	-	-	-	99	-	-	-	26.740.000	26.340.000
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	500.000.000	1.200.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	-	-	631.950.200	1.350.000.000	2.700.000.000	1.485.000.000	-	-	586.306.200	-	-	-	-	-	93	-	-	-	1.541.737.550	586.306.200
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	573.054.000	-	-	-	-	-	532.220.000	-	-	-	-	-	93	-	-	-	573.054.000	532.220.000
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,	-	-	6.410.400	-	-	-	-	-	6.410.400	-	-	-	-	-	100	-	-	-	6.410.400	6.410.400

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
RPJMD dan RKPD)																				
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	52.485.800	-	-	-	-	-	47.675.800	-	-	-	-	-	91	-	-	-	52.485.800	47.675.800
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	119.650.000	-	-	-	-	-	119.108.900	-	-	-	-	-	100	-	-	-	119.650.000	119.108.900
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	19.914.500	-	-	-	-	-	100	-	-	-	20.000.000	19.914.500
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	9.968.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-	10.000.000	9.968.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	89.650.000	-	-	-	-	-	89.226.400	-	-	-	-	-	100	-	-	-	89.650.000	89.226.400
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	10.803.044.890	14.200.000.000	12.980.000.000	14.558.000.000	-	-	10.460.092.658	-	-	-	-	-	97	-	-	-	13.135.261.223	10.460.092.658
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	10.803.044.890	-	-	-	-	-	10.460.092.658	-	-	-	-	-	97	-	-	-	10.803.044.890	10.460.092.658
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	89.716.000	-	75.000.000	175.000.000	-	-	83.746.000	-	-	-	-	-	93	-	-	-	113.238.667	83.746.000
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	89.716.000	-	-	-	-	-	83.746.000	-	-	-	-	-	93	-	-	-	89.716.000	83.746.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	745.830.250	1.719.000.000	1.906.000.000	1.965.000.000	-	-	684.955.805	-	-	-	-	-	92	-	-	-	1.583.957.563	684.955.805
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	9.347.700	-	-	-	-	-	9.345.900	-	-	-	-	-	100	-	-	-	9.347.700	9.345.900
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	87.364.400	-	-	-	-	-	86.002.785	-	-	-	-	-	98	-	-	-	87.364.400	86.002.785

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	5.537.350	-	-	-	-	-	5.529.300	-	-	-	-	-	100	-	-	-	5.537.350	5.529.300
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	22.252.000	-	-	-	-	-	11.847.500	-	-	-	-	-	53	-	-	-	22.252.000	11.847.500
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	49.507.800	-	-	-	-	-	37.990.000	-	-	-	-	-	77	-	-	-	49.507.800	37.990.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	12.000.000	-	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	-	85	-	-	-	12.000.000	10.200.000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	19.590.000	-	-	-	-	-	5.865.000	-	-	-	-	-	30	-	-	-	19.590.000	5.865.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	540.231.000	-	-	-	-	-	518.175.320	-	-	-	-	-	96	-	-	-	540.231.000	518.175.320
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	494.204.700	490.000.000	1.785.000.000	580.000.000	-	-	491.251.398	-	-	-	-	-	99	-	-	-	837.301.175	491.251.398
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	494.204.700	-	-	-	-	-	491.251.398	-	-	-	-	-	99	-	-	-	494.204.700	491.251.398

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	960.091.064	1.385.000.000	1.598.000.000	1.738.000.000	-	-	863.654.419	-	-	-	-	-	90	-	-	-	1.420.272.766	863.654.419
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	167.999.536	-	-	-	-	-	115.667.175	-	-	-	-	-	69	-	-	-	167.999.536	115.667.175
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	792.091.528	-	-	-	-	-	747.987.244	-	-	-	-	-	94	-	-	-	792.091.528	747.987.244
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	481.103.300	610.000.000	1.075.000.000	680.000.000	-	-	400.211.049	-	-	-	-	-	83	-	-	-	711.525.825	400.211.049
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	243.991.300	-	-	-	-	-	183.677.011	-	-	-	-	-	75	-	-	-	243.991.300	183.677.011
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	132.150.000	-	-	-	-	-	111.870.000	-	-	-	-	-	85	-	-	-	132.150.000	111.870.000

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	104.962.000	-	-	-	-	-	104.664.038	-	-	-	-	-	100	-	-	-	104.962.000	104.664.038
Program Perencanaan Tata Ruang																				
Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	-	192.935.000	-	-	-	-	-	172.427.000	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	192.935.000	172.427.000
Kegiatan Pengembangan Informasi Geospasial	-	103.715.000	-	-	-	-	-	99.646.000	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-	103.715.000	99.646.000
Program Pengembangan Data dan Informasi																				
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	-	46.144.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	46.144.000	50.000

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan							
1	Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	%	100	760.756.200	77,78	693.391.000
		Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100		100	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100		90	
		Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	%	100		100	
		Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	%	90		88,67	
		Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	%	30		48,21	
		Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	%	100		100	
1.1	Kegiatan : Penyusunan RPJMD 2020-2025				481.156.200		469.300.000
		Terselenggaranya FGD	Kegiatan	6		6	
		Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik	Kegiatan	1		1	
		Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	Kegiatan	1		1	
		Tersusunnya Naskah Akademik RPJMD	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya dokumen RPJMD	Dokumen	1		1	
1.2	Kegiatan : Perencanaan Umum				279.600.000		224.091.000
		Persentase terlaksananya tugas-tugas khusus yang tidak terencana dalam kegiatan	%	100		100	
		Jumlah Koordinasi Ke Provinsi dan Pusat	Bulan	12		12	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tersusunnya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1		1	
		Desain lansekap muka air di pasar jambu dua	Dokumen	1		1	
2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	%	97	82.290.000	100	79.200.000
		Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)	%	97		100	
		Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	data	9.266		9.016	
2.1	Kegiatan : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor				82.290.000		79.200.000
		Tersusunnya Data Aplikasi Simpatik Tahun 2019	Dokumen	1		1	
		Pemetaan Data Pembangunan	Elemen Data	9.016		9.016	
		Analitical Data Pokok Perencanaan	Data	1		1	
		Workshop Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	Kegiatan	70		70	
		Menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi dan Pusat/Koordinasi	Kegiatan	3		3	
3	Program. : Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	Miliar	4	110.450.000	4.910.000.000	108.810.000
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10		40,62	
3.1	Kegiatan : Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor				110.450.000		108.810.000
		Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR/TJSLP	Laporan	1		1	
		Laporan Pelaksanaan CSR/TJSLP	Laporan	1		1	
		Updating Data dan Peta Perusahaan Peserta CSR/TJSLP	Dokumen	1		1	
		Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan TJSLP	Aplikasi	1		1	
4	Program : Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	%	97	165.300.000	93	127.303.000
4.1					36.000.000		18.739.800

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya	Penyelenggaraan Rakor TKPK	Kegiatan	2		1	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Lingkup Subid Sosial dan Budaya	Bulan	12		12	
4.2	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan				129.300.000		108.563.200
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA.2019	Dokumen	1		1	
		Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bogor	Kegiatan	1		1	
		Rakor Kota Sehat	Kegiatan	2		2	
		Fasilitasi Komda lansia Kota Bogor	Kegiatan	1		1	
		Rakor Komdalansia	Kegiatan	1		1	
4.3	Kegiatan : Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR)				100.000.000		89.505.526
		Kompetisi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor	Kegiatan	1		1	
5	Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	%	97	722.689.000	100	682.522.000
5.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Perencanaan perumahan permukiman				185.400.000		179.697.000
		Fasilitasi Pokja Sanitasi	Kegiatan	4		4	
		Munas AKKOPSI dan City Sanitation Summit	Kegiatan	1		1	
		Fasilitasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	Kegiatan	4		4	
		Fasilitasi Pokja RPIJM	Kegiatan	4		4	
		Pembuatan Film Profil Kawasan Kumuh Kota Bogor	Video	1		1	
		Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Bogor	Dokumen	1		1	
5.2	Kegiatan : Review Masterplan Transportasi				536.800.000		502.825.000
		Dokumen Review Masterplan Transportasi	Dokumen	1		1	
5.3	Kegiatan : Perencanaan Cakupan pelayanan air minum non PDAM Kota Bogor				489.000	-	-

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dokumen Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	Dokumen	1		-	
6	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	%	97	437.905.600	93	248.381.800
6.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				275.955.600		240.385.600
		Dokumen Laporan Monev Bidang Ekonomi	Eksemplar	30		-	
		Rencana Pengembangan Industri Perkotaan	Dokumen	1		1	
6.2	Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor				161.950.000		7.996.200
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	Dokumen	1		-	
7	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	%	90	907.255.000	100	873.558.650
7.1	Kegiatan : Sosialisasi Tata Ruang				907.255.000		873.558.650
		Materi Sosialisasi Tata Ruang (Film)	Video	1		1	
		Maket Digital	Dokumen	1		1	
		Pendampingan	Kegiatan	1		1	
		Pra Desain Park and Ride Kawasan Bubulak	Dokumen	1		1	
		Pengembangan SIMTARU	Aplikasi	1		1	
		Hardware	Unit	1		1	
8	Program : Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	97	187.300.000	61,11	175.285.100
		Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	97		71,15	
8.1	Kegiatan : Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota				187.300.000		175.285.100
		Updating database E-monev lingkup bidang fisik	Laporan	12		12	
		Monitoring dan evaluasi capaian indikator yang terdapat pada RPJM, RKPD dan renja	Data	100		100	
Misi 2 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif							

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	80	544.700.000	86	514.415.100
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Rasio	1:10.000		2,6:10.000	
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	%	30		31,75	
9.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan				544.700.000		514.415.100,00
		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	Eksemplar	10		10	
		Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Eksemplar	700		700	
		Bahan Pra Musrenbang Tingkat Kota	Eksemplar	50		-	
		Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	Eksemplar	20		20	
		Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020	Buku	10		-	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	Hari	10		13	
		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Bogor	Kali	1		1	
		Pameran Pembangunan	Paket	1		1	
		Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan kelurahan	Penghargaan	4		4	
		Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	Kali	2		2	
		Buku hasil monev pemerintahan	Buku	40		40	
		RKPD Kota Bogor Tahun 2020, Pengesahan Renja Kota Bogor Tahun 2020 dan RKPDP Kota Bogor Tahun 2019	Dokumen	3		2	
10	Program : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	Inovasi	60	236.250.000	46	233.040.000
		Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	%	30		30,34	
		Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	Penghargaan	3		20	
10.1	Kegiatan : Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019				236.250.000		233.040.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik	Dokumen	1		1	
		Terlaksananya lomba kreatifitas inovasi di Kota Bogor	Kegiatan	20		20	
Misi 3 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel							
11	Program : Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Bappeda	Nilai	84	25.127.000	72,89	23.861.600
11.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				25.127.000		23.861.600
		Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LKIP	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LKPJ	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LPPD	Dokumen	1		1	
12	Program : Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	%	100	2.957.319.100	100	2.598.361.361
12.1	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Tangga OPD				2.957.319.100		2.598.361.361
		Honorarium Pegawai PNS	OB	24		12	
		Honorarium Pegawai Non PNS(Supir)2 Orang	OP	24		12	
		Belanja Alat Tulis Kerja	Paket	1		1	
		Belanja Cetak dan Penjilidan	Buah	12		12	
		Belanja Listrik dan Elektronik	Buah	12		12	
		Pembayaran Listrik	Bulan	12		12	
		Belanja Surat Kabar	Bulan	12		12	
		Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12		12	
		Telepon	Bulan	12		12	
		Belanja Makan Minum Tamu	Orang	1161		668	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	Orang	11533		2.964	
		Belanja Peralatan Rumah Tangga	Buah	491		212	
		Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	Buah	24		21	
		Belanja Gas	Buah	6		4	
		Belanja bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	Bulan	12		12	
		Pembayaran STNK	Unit	34		13	
		Pengadaan Jasa Keamanan	Paket	1		1	
		Pengadaan Jasa Kebersihan	Paket	1		1	
13	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1.539.250.000	100	1.398.818.937

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.1	Kegiatan : Pengadaan Inventaris Kantor				648.000.000		544.485.420
		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	OB	4		-	
		BM.Gorden	M	110		110	
		BM.Lemari Arsip	Unit	3		3	
		BM.Mesin Penghancur	Unit	5		5	
		BM.TV Digital	Unit	1		1	
		BM.AC 2 PK AC	Unit	3		3	
		BM.Dispenser	Unit	3		3	
		BM.Microwave	Unit	2		2	
		BM.Kulkas	Unit	2		2	
		BM.Komputer PC	Unit	2		2	
		BM.Printer	Unit	4		4	
		BM.Monitor	Unit	4		4	
		BM.Laptop	Unit	3		3	
		BM.Meja Rapat	Unit	1		1	
		BM.Sound System	Unit	1		1	
		Printer Portable	Unit	6		6	
13.2	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Invenaris Kantor				891.250.000		854.333.517
		Tune UP	Unit	10		2	
		Ganti Oli mesin	Unit	10		10	
		Ganti Oli gardan dan perseneling	Unit	10		10	
		Suku Cadang Mobil	Unit	10		10	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	
				Tahun 2019		Tahun 2019	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pembelian Ban kendaraan	Unit	10		10	
		Terpeliharanya Mesin Penghancur Kertas	Unit	16		16	
		Terpeliharanya Tabung Pemadam kebakaran	Unit	10		10	
		Terpeliharanya AC	Unit	43		43	
		Terpeliharnya PC Komputer	Unit	50		50	
		Terpeliharnya Printer	Unit	50		50	
		Terpeliharanya Laptop	Unit	34		34	
		Terpeliharnya Mesin Foto Copy	Unit	1		1	
		Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telpon	Unit	2		2	
		Terpeliharanya Bangunan/Gedung Bappeda	Gedung	1		1	
		Jasa Konsultant Perencanaan	Dokumen	2		2	
		Jasa Konsultant Pengawas	Dokumen	1		1	
		Tertatanya Lingkungan Taman di Lingkungan Bappeda	Paket	1		1	
		Total					8.676.591.900

Tabel 2.11.

**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020		Tahun 2020	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas							
1	Program : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Hasil Kelitbangan	Hasil Kelitbangan	10	583.178.400	117	553.740.100
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	2		2	
		Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	5,2		7	
		Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	Hasil Kelitbangan	7		7	
1.1	Kegiatan : Penguatan SIDA Kota Bogor				168.150.000		147.365.500
		Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	Jejaring	1		1	
		Sosialisasi HAKI Inovasi dan IGA	Sosialisasi	2		2	
		Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi	Video	3		-	
		Fasilitasi pendaftaran sertifikasi HAKI Inovasi	Paket	1		-	
1.2	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Ekonomi				129.875.000		129.685.000
		Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait pemulihan ekonomi Kota Bogor ditengah wabah COVID-19	Dokumen	1		1	
1.3	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya				176.226.000		169.622.200
		Tersedianya Kajian Rencana Induk Pembangunan Ketahanan Keluarga	Dokumen	1		1	
1.4	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Pembangunan				108.927.400		107.067.400
		Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	Dokumen	1		1	
2	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20:100	235.926.300	25:100	234.875.800
		Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1:100		1:100	
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	6		11	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10		10	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020		Tahun 2020	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22		23,35	
2.1	Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)				211.482.800		211.482.800
		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen	1		1	
		Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan	6		6	
		Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	Bidang	4		4	
		Rekapitulasi Hasil Musrenbang	Dokumen	1		1	
		Terlaksananya Forum PD	Hari	10		10	
		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota	hari	1		1	
		Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penghargaan	4		4	
		Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	Kali	2		2	
2.2	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				24.443.500		23.393.000
		Rancangan RKPD Tahun 2021	Set	5		5	
		Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2021	Buku	10		10	
		Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020	Set	5		5	
		Peraturan Walikota tentang RKPD Perubahan Tahun 2020	Buku	10		10	
		Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA. 2021	Paket	1		1	
		Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll Perubahan TA. 2020	Paket	1		1	
3	Program : Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	73	1.000.000	77,83	928.000
3.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya				1.000.000		928.000
		Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1		-	
		Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1		-	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020		Tahun 2020	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
4	Program : Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	2.370.000	77,83	2.370.000
4.1	Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman				2.370.000		2.370.000
		Fasilitasi Pokja Sanitasi dan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1		1	
		Kajian Evaluasi dan Perencanaan Sanimas Kota Bogor	Dokumen	1		1	
5	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	46.144.000	77,83	42.763.000
5.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan				46.144.000		42.763.000
		Dokumen Perencanaan Kota Sehat	Dokumen	1		1	
6	Program : Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90	50.000	100	50.000
6.1	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah				50.000		50.000
		Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	Elemen Data	9.216		9.216	
7	Program : Pengendalian Pembangunan	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	80	12.100.000	65,72	12.100.000
7.1	Kegiatan : Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah				12.100.000		12.100.000
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1		1	
		Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	Buah	180		180	
8	Program : Kerjasama Pembangunan	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	22.036.000	19,34	17.236.000
8.1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan TJSLP/CSR				22.036.000		17.236.000
		Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	Dokumen	1		1	
		Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	Kali	3		5	
		Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	Dokumen	1		1	
9	Program : Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	170.075.000	BB	167.910.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020		Tahun 2020	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
9.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				170.075.000		167.910.000
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LKIP	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LKPJ	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya LPPD	Dokumen	1		1	
		Terlaksananya Redesign dan Redevelopment Website Bappeda	Website	1		1	
		Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	1		1	
10	Program : Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	%	100	1.777.936.180	100	1.282.098.810
10.1	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Tangga OPD				1.777.936.180		1.282.098.810
		Honorarium Pegawai PNS	Bulan	12		12	
		Honorarium Pegawai Non PNS (Supir)	Bulan	12		12	
		Belanja Alat Tulis Kerja	Paket	1		1	
		Pembayaran Listrik	Bulan	12		12	
		Belanja Surat Kabar	Bulan	12		12	
		Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12		12	
		Pembayaran Telepon	Bulan	12		12	
		Belanja Makan Dan Minum Rapat	Paket	1		1	
		Pembayaran STNK Roda 2	Unit	24		24	
		Pembayaran STNK Roda 4	Unit	10		10	
		Pengadaan Jasa Keamanan	Paket	1		1	
		Pengadaan Jasa Kebersihan	Paket	1		1	
		Capacity Building	Kegiatan	1		1	
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	1.170.770.000	80	995.588.850
11.1	Kegiatan : Pengadaan Inventaris Kantor				515.850.000		514.450.350
		Pengadaan Televisi LED	Unit	1		1	
		Mesin Sleding Door	Paket	1		1	
		Kursi Tamu/Sice	Set	1		1	
		Kursi Lipat	Set	1		1	
		Pengadaan Server	Unit	1		1	
		Kursi Sandaran Rendah	Buah	12		12	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020		Tahun 2020	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
		Kunci Pintu Digital (Digital Times and Attendance Acces Control System)	Unit	1		1	
		Lemari Arsip	Unit	4		4	
		Pengadaan Peralatan Video Conference	Unit	3		3	
11.2	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				654.920.000		481.138.500
		Renovasi Bappeda	Paket	1		1	
		Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1		1	
		Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1		1	
		Terpeliharanya Peralatan dan mesin	Paket	1		1	
		Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	10		10	
		Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera					
12	Program 4.1.1 : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100	296.650.000	100	272.073.000
12.1	Kegiatan : Perencanaan Tata Ruang				192.935.000		172.427.000
		Dokumen Laporan Pendampingan	Dokumen	1		1	
12.2	Kegiatan : Pengembangan Informasi Geospasial				103.715.000		99.646.000
		Simtaru dan Simpul Jaringan	Sistem	1		1	
Total					4.318.235.880		3.581.733.560

Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2021

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas							
1	Program : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Hasil Kelitbangan	Hasil Kelitbangan	10	1.496.817.400	143	1.469.709.005
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	2		2	
		Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	5,2		60	
		Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	Hasil Kelitbangan	7		68	
1.1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan	1	233.842.000	1	230.223.000
		Jumlah kampung tematik /kampung wisata	Dokumen	2		2	
1.1.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	Dokumen	1	132.552.000	1	129.128.000
1.1.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersusunnya dokumen ilustrasi perencanaan satu kampung tematik	Dokumen	1	101.290.000	1	101.095.000
		Tersusunnya dokumen Lokasi-lokasi prioritas pembangunan kampung tematik	Dokumen	1		1	
1.2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Dokumen	1	1.012.415.400	1	998.144.005

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
1.2.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tersusunnya Dokumen Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor	Dokumen	1	600.135.400	1	587.599.005
1.2.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen Kajian Kebersihan Lingkungan	Dokumen	1	412.280.000	1	410.545.000
1.3	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan	Jumlah	66	250.560.000	66	241.342.000
		Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	Jumlah	54		54	
1.3.1	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi	Video	2	225.560.000	2	217.492.000
		Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	Jejaring	1		1	
		Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2021	Lomba	1		1	
1.3.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	25.000.000	1	23.850.000
2	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	22:100	930.397.000	31:100	881.149.060
		Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	2:100		2:100	
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	7		18	
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	23		23,75	
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90		100	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10		8,88	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10		26,02	
		Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	85		74,91	
2.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Orang	1.100	751.729.000	2.000	711.314.060
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pendanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100		100	
		Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program	17		17	
2.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Forum perangkat daerah RKPD	Berita Acara	1	413.320.000	1	397.580.400
		Konsultasi publik RKPD	Berita Acara	1		1	
		Musrenbang RKPD Tingkat Kota	Berita Acara	1		1	
		Konsultasi publik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara	1		1	
		Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara	1		1	
2.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Perda Perubahan RPJMD tahun 2019-2024	Perda	1	256.209.000	-	255.377.000
		Perkada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024	Perkada	1		-	
		Perkada Renja Perangkat Daerah	Perkada	1		1	
		Perkada perubahan Renja Perangkat Daerah	Perkada	1		1	
		Perkada RKPD	Perkada	1		1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
		Perkada RKPD Perubahan	Perkada	1		1	
2.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Gebyar CSR/TJS LP	Kegiatan	1	32.200.000	-	8.592.000
		Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJS LP	Dokumen	1		1	
2.1.4	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Naskah Akademis Penyusunan Perubahan RPJMD 2019-2024	Dokumen	1	50.000.000	1	49.764.660
2.2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data	9.216	135.668.000	9.216	129.935.000
2.2.1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku Data dan Analisa Pembangunan Daerah	Dokumen	1	135.668.000	1	129.935.000
2.3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	Jumlah	20	43.000.000	20	39.900.000
2.3.1	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi RKPD	Dokumen	4	43.000.000	4	39.900.000
		Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi Bankeu dan DAK	Dokumen	4		4	
		Terlaksananya Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan	1		1	
		Tersusunnya Laporan Tahunan Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan	1		1	
3	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	78	677.840.200	77,83	631.796.200
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	79		77,83	
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	77		77,83	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
3.1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program Bidang Pemerintahan Umum yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	27	45.890.000	27	45.490.000
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Umum yang mencapai target	Jumlah	63		63	
		Jumlah Program Bidang Pemerintahan Wilayah yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	4		4	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Wilayah yang mencapai target	Jumlah	12		12	
		Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	22		22	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mencapai target	Jumlah	54		54	
3.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Monev Perencanaan Subid Pemerintahan	Laporan	1	3.150.000	1	3.150.000
3.1.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Tersusunnya Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	16.000.000	-	16.000.000
		Tersusunnya Rekomendasi Program/ Kegiatan Konvergensi Stunting	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya Rekomendasi Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1			
3.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pembinaan Forum Kota Sehat	Bulan	6	26.740.000	6	26.340.000
		Rapat Koordinasi Kota Sehat	Kegiatan	2		2	
3.2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Program Bidang Infrastruktur yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	10	631.950.200	10	586.306.200
		Jumlah Indikator Program Pembangunan Bidang Infrastruktur yang mencapai target	Jumlah	20		20	
		Jumlah Program Bidang Kewilayahan yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	14		14	
		Jumlah Indikator Program Pembangunan Bidang Kewilayahan yang mencapai target	Jumlah	22		22	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
3.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Masterplan Utilitas	Dokumen	1	573.054.000	1	532.220.000
3.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Masterplan Air Limbah (KAK, HPS, RKS)	Dokumen	1	6.410.400	1	6.410.400
3.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Dokumen RAD GRK	Dokumen	1	52.485.800	1	47.675.800
		Cetak Peta Perubahan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031	Lembar	24		24	
		Sosialisasi Perubahan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031	Kegiatan	2		2	
4	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	13.693.640.204	A	13.103.020.274
		Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	Persen	90		100	
		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100		100	
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	85		100	
4.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	119.650.000	100	119.108.900
4.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Ranwal Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024	Dokumen	1	20.000.000	1	19.914.500
		Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda	Dokumen	1		1	
		Renja Perubahan	Dokumen	1		1	
4.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen LKIP	Dokumen	1	10.000.000	1	9.968.000
		Tersusunnya Dokumen LKPJ	Dokumen	1		1	
		Tersusunnya Dokumen LPPD	Dokumen	1		1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
4.1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko Bappeda	Dokumen	1	89.650.000	1	89.226.400
		Peningkatan Pelayanan Bappeda	Dokumen	1		1	
4.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	10.803.044.890	100	10.460.092.658
4.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Penerima Gaji	Orang/Bulan	45	10.803.044.890	45	10.460.092.658
		Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45		45	
4.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administra kepegawaian Bappeda	Persen	100	89.716.000	100	83.746.000
4.3.1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capacity Building	Kegiatan	1	89.716.000	1	83.746.000
4.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	Persen	100	745.830.250	100	684.955.805
4.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	Paket	1	9.347.700	1	9.345.900
4.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kerja	Tahun	1	87.364.400	1	86.002.785
4.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Paket	1	5.537.350	1	5.529.300
4.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Air Minum Pegawai	Galon	900	22.252.000	900	11.847.500
		Terpenuhinya Kebutuhan Gas	Tabung	6		6	
4.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bahan Dekorasi	Paket	1	49.507.800	1	37.990.000
		Terpenuhinya Kebutuhan Cetak	Paket	1		1	
		Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan	Lembar	41.000		21.000	
4.4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar/Majalah	Bulan	12	12.000.000	12	10.200.000
4.4.7	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	Orang	420	19.590.000	420	5.865.000
4.4.8		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Paket	1	540.231.000	1	518.175.320

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pelatihan/ Sosialisasi/ Bimtek/ Seminar / Lokakarya	Paket	1		1	
		Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1		1	
4..5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	Persen	85	494.204.700	100	491.251.398
4.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan AC	Unit	2	494.204.700	2	491.251.398
		Jumlah Pengadaan Dispenser	Unit	2		2	
		Jumlah Pengadaan Komputer PC	Unit	4		4	
		Jumlah Pengadaan Laptop	Unit	4		4	
		Jumlah Pengadaan Penghancur Kertas	Unit	2		2	
		Jumlah Pengadaan Printer	Unit	6		6	
		Jumlah Pengadaan Scanner	Unit	2		2	
4.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional	Persen	100	960.091.064	100	863.654.419
4.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12	167.999.536	12	115.667.175
		Pembayaran Listrik	Bulan	12		12	
		Pembayaran Telepon	Bulan	12		12	
4.6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Keamanan	Orang	4	792.091.528	4	747.987.244
		Pemenuhan Jasa Kebersihan	Orang	4		4	
		Pemenuhan Tenaga Administrasi	Orang	12		12	
		Pemenuhan Tenaga Angkut/Supir	Orang	1		1	
4.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD pemeliharaan	Persen	85	481.103.300	100	400.211.094

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021		Tahun 2021	
				Target	Rp	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
4.7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran STNK Kendaraan Roda 2	Unit	24	243.991.300	24	183.677.011
		Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4	Unit	10		10	
		Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	10		10	
		Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Gas	Bulan	12		12	
4.7.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Paket	1	132.150.000	1	111.870.000
4.7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1	104.962.000	1	104.664.083
		Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1		1	
		Renovasi Bappeda	Paket	1		1	
Total					16.798.694.804		16.085.674.539

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan : Perumusan kebijakan Perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, Koordinasi terkait bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pengembangan statistik skala kota, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan Bappeda Kota Bogor diantaranya:

- Penyediaan data makro sebagai dasar pembangunan daerah
- Penyediaan dan penyusunan dokumen perencanaan makro baik spasial dan a-spasial, baik jangka panjang, menengah dan tahunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD
- Penyediaan dan penyusunan dokumen perencanaan sektoral, seperti masterplan dan rencana induk
- Pelayanan dan bimbingan terkait penyusunan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah
- Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan spasial dan a-spasial

Bappeda dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terkait perencanaan terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terwujud di dalam proses penganggaran;
3. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang perencanaan;
4. Optimalisasi sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan;
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lain;
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat basis wilayah yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan, penggunaan teknologi informasi, serta pengendalian evaluasi dan pelaporan atas perencanaan pembangunan.
10. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan.

11. Optimalisasi perencanaan pembangunan dimasa pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19.

Dalam melaksanakan tugas diatas khususnya terkait penyusunan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan, maka Bappeda harus merujuk pada rencana pada RTRW Kota Bogor yang sudah berbasis spasial dan a spasial yang terdiri dari rencana struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis yang dituangkan dalam indikasi program. Untuk mewujudkan rencana tersebut memperhatikan rambu-rambu aspek lingkungan hidup yang tertuang dalam KLHS-nya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Bappeda)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya telah diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 178 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa tugas Bappeda Kota Bogor yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan secara fungsi. Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas Bappeda diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, dengan dukungan dari berbagai unsur/sektor dari setiap pemangku kepentingan pembangunan. Kinerja Pembangunan Daerah sangat ditentukan dari kualitas produk perencanaannya, serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk mendukung perumusan teknokratis kebijakan pembangunan daerah .

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan

selama kurun waktu Tahun 2019-2021, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan pokok dalam pencapaian kinerja urusan tersebut, antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara lain:
 - a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah;
 - b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD);
 - c. Belum optimalnya sinergitas perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/ perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD);
2. Belum optimalnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dari ketercapaian target sasaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yang masih relatif rendah.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan untuk menjawab permasalahan pembangunan Kota Bogor.

Apabila dievaluasi lebih jauh, bahwa 3 (tiga) permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas disebabkan karena :

1. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;
2. Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
3. Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)
4. Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;
5. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;
6. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;

7. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;
8. Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);
9. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah;
10. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;
11. Masih lemahnya system monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan perencanaan sektoral;
12. Masih belum optimalnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah kota.

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Bappeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan antara lain :

a. Kapasitas SDM Bappeda

Kuantitas dan kualitas (kualifikasi dan kompetensi) SDM Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan. Dari hasil evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM Bappeda Kota Bogor masih kekurangan 46 Orang. Sementara dari sisi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, maka masih dibutuhkan 19 Orang dengan kualifikasi S1/D-4 terkait jabatan dengan kompetensi bersertifikat diklat perencanaan, Keuangan/Anggaran, dan atau yang sesuai dengan jabatan terkait.

b. Sistem perencanaan

1. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah kota Bogor untuk mengimplementasikan kebijakan baru baik di tingkat Nasional,

Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Bappeda.

2. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.

Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normatif sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan pembangunan daerah seringkali masih belum selaras, konsisten dan terpadu untuk pencapaian visi dan misi.

4. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi

d. Kolaborasi instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat. Peran serta instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor sangat ditentukan dari optimalisasi pola koordinasi, kolaborasi, kemitraan dan partisipasi antar pemangku kepentingan tersebut.

e. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan Untuk mendorong keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, maka komitmen bersama antar pemangku kepentingan menjadi faktor yang sangat berpengaruh untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan program.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan, dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, maka terdapat beberapa

permasalahan yang dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	1. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan; 2. Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional; 3. Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	1. Kapasitas SDM Bappeda; 2. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. 4. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; 5. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi 6. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan
	4. Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai; 5. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah; 6. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;	
	7. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah; 8. rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja); 9. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	10. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	
2. Belum optimalnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dari ketercapaian target sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yang masih relative rendah yaitu baru mencapai 74%.	1. Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan perencanaan sektoral.	1. Kapasitas SDM Bappeda; 2. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; 4. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi 5. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
- b. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

- c. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2019-2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

b. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/ mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka **tugas dan fungsi Bappeda** adalah mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat daerah agar arah kebijakan untuk pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diatas dapat diselaraskan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seluruh perangkat daerah sehingga visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat terwujud pada Tahun 2019-2024, dan Bappeda juga harus dapat memastikan bahwa seluruh tahapan proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasinya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sangat berkaitan erat dengan Misi ke-2 Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas dan misi ke-3 Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Dalam penjabarannya, Misi ke-2 dan ke 3 diturunkan ke dalam Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, Kota Bogor mempunyai **VISI** yaitu:

“ TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA “

Adapun visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor:

Demi tercapainya Visi dan Misi Kota Bogor yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024, dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Bappeda memiliki keterkaitan dengan misi 2 dan misi 3 pada RPJMD tahun 2019-2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

Misi 2 :

- a. Tujuan : terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berkarakter (smart people) dengan sasaran meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat. Adapun indikator tujuan dan indikator sasarannya adalah Kategori Inovasi Daerah yang pada akhir tahun 2024 ditargetkan mencapai kategori Inovatif.
- b. Tujuan : terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan Melayani (smart Government) dengan sasaran terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun indikator tujuan dan indikator sasarannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dimana pada akhir Tahun 2024 Kota Bogor ditargetkan mendapatkan nilai A untuk Indeks Reformasi Birokrasinya.

Misi 3 :

- a. Tujuan : terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator tujuan adalah laju pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun 2024 ditargetkan mencapai 6,04%.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, sesuai amanat Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, ada beberapa program yang diamanatkan kepada Bappeda untuk dapat dilaksanakan selama periode tahun 2019-2024 yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan uraian Visi-Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka perlu diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024. Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM Perencana;

Keterbatasan dalam pemenuhan SDM perencana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Analisa jabatan dan Analisa beban kerja Bappeda baik secara kuantitas maupun kualitas, sangat menghambat dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan di tingkat Kota sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM Perencana.

2. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal;

Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan pembangunan daerah seringkali masih belum selaras, konsisten dan terpadu untuk pencapaian visi dan misi.

3. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal;

Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik

sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi
5. Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran

Sedangkan yang dapat menjadi **Faktor Pendorong** yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
2. Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
3. Komitmen setiap aparatur Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja semakin meningkat.
4. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota.

Tabel.3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas	✓ Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD).	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sektor; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	✓ Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. ✓ Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda ✓ Komitmen setiap aparatur Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja semakin meningkat ✓ Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota.
		✓ Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.	
		✓ Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;	✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
		✓ Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun	✓ Kapasitas SDM Perencana;	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)		
		✓ Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
		✓ Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;	✓ Kapasitas SDM Perencana;	
		✓ Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya; ✓ Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sektor; ✓ Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sektor;	
		✓ Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sektor; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.	
		✓ Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	✓ Kapasitas SDM Perencana/peneliti; ✓ Pola koordinasi antar sector	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			✓ Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	
		✓ Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
		✓ Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya penelaahan terhadap dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Perubahan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024. Tujuan dan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	Tingkat Komitansi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Tingkat komitansi perencanaan pembangunan Jawa Barat	persen		80	85	90	95	100
			2. Nilai lampiran Perencanaan Kinerja pada Rencana SKRP Provinsi	persen				80	81	82
		2. Terpenuhinya dukungan manajemen pemerintahan	3. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen pemerintahan	persen	100	100	100	100	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui **strategi pencapaian** sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat pada berbagai lingkup bidang.
2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat
3. Meningkatkan kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
4. Meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

6. Meningkatkan ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, **ada beberapa program** yang akan dilaksanakan oleh **Bappeda Jawa Barat** yaitu :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam mendukung target target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Jabar Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Efektivitas Pola koordinasi antara Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang propinsi, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi
4. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya faktor faktor pendorong yang dapat mendukung pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Bappeda propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah sinergis dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024
2. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyelarasan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota Bogor sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Pada Tahun 2021, Kota Bogor telah melaksanakan perubahan RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 yang dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Perubahan RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada.

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:

- a. Peraturan yang dikeluarkan di tingkat pusat atau provinsi terkait dengan substansi dalam rencana tata ruang, misalkan adanya UU, PP, Permen, Perda provinsi, Perda kota dan lain-lain.
- b. Kebijakan dan rencana regional dari kementerian/lembaga di pusat dan provinsi yang terkait dengan rencana tata ruang Kota Bogor, yang berakibat kepada adanya perubahan:

- 1) Perubahan rencana struktur ruang, yaitu sistem pusat dan rencana infrastruktur.
- 2) Perubahan rencana pola ruang.
- c. Rencana tata ruang wilayah tetangga (Kabupaten Bogor) dan rencana yang telah disepakati dengan wilayah tetangga (Kabupaten Bogor).

Di samping faktor eksternal, perubahan RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhinya. Faktor internal ini sebagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perubahan RTRW Kota Bogor diantaranya:

1. Rencana dan Kajian Sektoral

Dalam perjalanan realisasi RTRW Kota Bogor, beberapa rencana dan kajian sektoral telah disusun setelah RTRW diperdakan. Hasil dari rencana dan kajian tersebut merupakan turunan dari rencana tata ruang dengan pendetailan sesuai kebutuhan sektor. Pendetailan tersebut guna menjabarkan rencana tata ruang serta menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan sektor pada masa mendatang. Maka dari itu dalam evaluasi RTRW ini, hasil rencana dan kajian sektor perlu dipertimbangkan guna mengevaluasi apakah rencana yang ada masih relevan untuk dilanjutkan atau terdapat rencana dan targetan sektor yang baru yang perlu diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

2. Isu Strategis Penegasan Batas Kota

Batas kota yang saat ini digunakan oleh Kota Bogor, mulai tahun 2014 disempurnakan batas batasnya di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya peta batas Kota Bogor yang telah disempurnakan pada tahun 2014 dan yang akan digunakan untuk segala keperluan administrasi batas kota termasuk dalam RTRW Kota Bogor. Kondisi ini akan menyebabkan perlunya diperbaiki peta dasar maupun peta tematik yang ada dalam RTRW Kota Bogor, yaitu peta dengan batas yang paling aktual.

3. Isu Strategis Baru Transportasi

Aspek transportasi merupakan aspek penting sebagai pembentuk kota. Dalam mewujudkan rencana tata ruang Kota Bogor, dalam kurun 5 tahun terakhir ini terdapat beberapa isu strategis transportasi yang akan mempengaruhi transportasi Kota Bogor. Isu strategis ini akan turut menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan, strategi, rencana dan program transportasi.

Beberapa isu strategis transportasi Kota Bogor.

1. Transportasi Masal

- Rencana Pengembangan transpakuan
- Rencana pengembangan angkutan berbasis rel
- TOD Sukaresmi

2. Terminal Baranangsiang
 - Terminal tipe A
 - Stasiun LRT
3. Rencana Terminal Tanah Baru
 - Terminal tipe B
 - Stasiun LRT/monorel
 - Terminal Barang
 - TOD/mixed used
4. Jalur Pejalan Kaki (Pedestrian, Skywalk)
 - Baranangsiang – Suryakencana
 - Sukaresmi
 - Air Mancur – Sempur
4. Isu Strategis Perbedaan Pola Ruang Eksisting Dengan Rencana
5. Penyesuaian penamaan Wilayah Pelayanan (WP)

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Bogor tahun 2019-2024, telaahan terhadap Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bogor, maka diperoleh **4 (empat) Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024** yaitu :

- 1. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
- 2. Penguatan perencanaan partisipatif;
- 3. Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 4. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.4.

Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bappeda Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD)	1. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; 2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
2.	Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	
3.	Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	
4.	Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;	

No.	Permasalahan	Isu Strategis
5.	Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;	1. Penguatan peran kelitbang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
6.	Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;	
7.	Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	
8.	Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	
9.	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja
10.	Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	
11.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang	
12.	Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;	Penguatan perencanaan partisipatif
13.	Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;	Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: ***“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”*** Kemudian diturunkan menjadi **3 (tiga) Misi** yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Bappeda mendukung dalam mewujudkan Misi ke-2 **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”** dan Misi ke-3 **“Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera”**.

Demi terwujudnya Misi ke-2 dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 2 (dua) **Tujuan** yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Kreatif dan Inovatif, dengan indikator kinerja Tujuan :
 - Kategori Inovasi Daerah.

Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Sasaran yaitu :

 - a. Meningkatnya kreativitas, inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Kategori inovasi Daerah
 - 2) Indeks Kualitas Kebijakan
 - 3) Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.
2. Terwujudnya Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Tujuan :
 - Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
 - Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah

Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Sasaran yaitu :

 - a. Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota

- 2) Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target
- b. Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah

Demi terwujudnya Misi ke-3 dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 1 (satu) **Tujuan** yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Kreatif dan Inovatif, dengan indikator kinerja Tujuan :
 - Kategori Inovasi Daerah.
 Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya kreativitas, inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Kategori inovasi Daerah

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif		Kategori Inovasi Daerah	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif
	Sasaran 1.1. : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Kategori Inovasi Daerah	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif
		Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	Sedang	Sedang	Baik
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	-	-	50	50	50

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Pertisipasif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
		Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	-	-	80,01	81	82
	Sasaran 2.1. : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	-	-	69	71	73
	Sasaran 2.2. : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	-	-	80,01	81	82

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab 3, bahwa untuk mencapai tujuan di Misi 2, Bappeda Kota Bogor menetapkan 2 tujuan dan 3 sasaran. Untuk mewujudkan ketujuh sasaran tersebut, Bappeda Kota Bogor merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif	Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Kategori Inovasi Daerah	Meningkatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah dan Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1. Menggali Kreatifitas dan inovasi masyarakat dan ASN dalam pembangunan daerah. 2. Penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi. 3. Membuat Komitmen agar rekomendasi hasil litbang ditindaklanjuti jadi kebijakan.
		Kategori Inovasi daerah		
		Indeks Kualitas Kebijakan		
		Persentase rekomendasi hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan		
Tujuan 2 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektivitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Mengembangkan sistem capaian kinerja perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berbasis kinerja	1. Penguatan Peta Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dan tahunan. 2. Penguatan data dan Informasi. 3. Menjamin ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat daerah. 4. Penguatan Sistem Informasi E database dan E Planning. 5. Diversifikasi skema pembiayaan pembangunan daerah. 6. Penguatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis kinerja
		Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah		
		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target		1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis kinerja. 2. Pemberian reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah
	Sasaran 2 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional	1. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi dan evaluasi secara berkala atas penerapan Reformasi Birokrasi lingkup Bappeda. 2. Meningkatkan koordinasi aparatur perencanaan pembangunan daerah. 3. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM perencana dan fungsional melalui diklat dengan lembaga diklat dalam dan luar negeri terkait. 4. Menginventarisir Kebutuhan sarana dan prasarana operasional lingkup Bappeda.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor melalui perwujudan tujuan, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2022-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkelanjutan					
1	Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	%	100	760.756.200
		Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	
		Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	%	100	
		Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	%	90	
		Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	%	30	
		Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	%	100	
1.1	Kegiatan : Penyusunan RPJMD 2020-2025				481.156.200

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terselenggaranya FGD	Kegiatan	6	
		Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik	Kegiatan	1	
		Terselenggaranya Musrenbang RPJMD	Kegiatan	1	
		Tersusunnya Naskah Akademik RPJMD	Dokumen	1	
		Tersusunnya dokumen RPJMD	Dokumen	1	
1.2	Kegiatan : Perencanaan Umum				279.600.000
		Persentase terlaksananya tugas-tugas khusus yang tidak terencana dalam kegiatan	%	100	
		Jumlah Koordinasi Ke Provinsi dan Pusat	Bulan	12	
		Tersusunnya Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Dokumen	1	
		Desain lansekap muka air di pasar jambu dua	Dokumen	1	
2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	%	97	82.290.000
		Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)	%	97	
		Jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	data	9266	
2.1	Kegiatan : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor				82.290.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersusunnya Data Aplikasi Simpatik Tahun 2019	Dokumen	1	
		Pemetaan Data Pembangunan	Elemen Data	9016	
		Analitical Data Pokok Perencanaan	Data	1	
		Workshop Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	Kegiatan	70	
		Menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Propinsi dan Pusat/Koordinasi	Kegiatan	3	
3	Program. : Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSPL	Miliar	4	110.450.000
		Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	
3.1	Kegiatan : Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor				110.450.000
		Database Penawaran Program dan Kegiatan CSR/TJSPL	Laporan	1	
		Laporan Pelaksanaan CSR/TJSPL	Laporan	1	
		Updating Data dan Peta Perusahaan Peserta CSR/TJSPL	Dokumen	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan TJSLP	Aplikasi	1	
4	Program : Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	%	97	165.300.000
4.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya				36.000.000
		Penyelenggaraan Rakor TKPK	Kegiatan	2	
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Kegiatan Lingkup Subid Sosial dan Budaya	Bulan	12	
4.2	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan				129.300.000
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Capaian Program RPJMD Lingkup Pemberdayaan TA.2019	Dokumen	1	
		Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bogor	Kegiatan	1	
		Rakor Kota Sehat	Kegiatan	2	
		Fasilitasi Komda lansia Kota Bogor	Kegiatan	1	
		Rakor Komdalansia	Kegiatan	1	
5	Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	%	97	722.689.000
5.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Perencanaan perumahan permukiman				185.400.000
		Fasilitasi Pokja Sanitasi	Kegiatan	4	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Munas AKKOPSI dan City Sanitation Summit	Kegiatan	1	
		Fasilitasi Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	Kegiatan	4	
		Fasilitasi Pokja RPIJM	Kegiatan	4	
		Pembuatan Film Profil Kawasan Kumuh Kota Bogor	Video	1	
		Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Kota Bogor	Dokumen	1	
5.2	Kegiatan : Review Masterplan Transportasi				536.800.000
		Dokumen Review Masterplan Transportasi	Dokumen	1	
5.3	Kegiatan : Perencanaan Cakupan pelayanan air minum non PDAM Kota Bogor				489.000
		Dokumen Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor	Dokumen	1	
6	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	%	97	437.905.600
6'1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				275.955.600
		Dokumen Laporan Monev Bidang Ekonomi	Eksemplar	30	
		Rencana Pengembangan Industri Perkotaan	Dokumen	1	
6.2	Kegiatan : Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor				161.950.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dokumen Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor	Dokumen	1	
7	Program : Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	%	90	907.255.000
7.1	Kegiatan : Sosialisasi Tata Ruang				907.255.000
		Materi Sosialisasi Tata Ruang (Film)	Video	1	
		Maket Digital	Dokumen	1	
		Pendampingan	Kegiatan	1	
		Pra Desain Park and Ride Kawasan Bubulak	Dokumen	1	
		Pengembangan SIMTARU	Aplikasi	1	
		Hardware	Unit	1	
8	Program : Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	97	187.300.000
		Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target	%	97	
8.1	Kegiatan : Upgreding Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota				187.300.000
		Updating database E-monev lingkup bidang fisik	Laporan	12	
		Monitoring dan evaluasi capaian indikator yang terdapat pada RPJM, RKPD dan renja	Data	100	
Misi 2 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akomodatif					
9	Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	80	544.700.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	Rasio	1:10000	
		Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	%	30	
9.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan				544.700.000
		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	Eksemplar	10	
		Bahan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Eksemplar	700	
		Bahan Pra Musrenbang Tingkat Kota	Eksemplar	50	
		Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	Eksemplar	20	
		Rekapitulasi Hasil Musrenbang Tahun 2019 untuk Perencanaan Tahun 2020	Buku	10	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	Hari	10	
		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota Bogor	Kali	1	
		Pameran Pembangunan	Paket	1	
		Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan kelurahan	Penghargaan	4	
		Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	Kali	2	
		Buku hasil monev pemerintahan	Buku	40	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		RKPD Kota Bogor Tahun 2020, Pengesahan Renja Kota Bogor Tahun 2020 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2019	Dokumen	3	
10	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	Inovasi	60	236.250.000
		Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	%	30	
		Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	Penghargaan	3	
10.1	Kegiatan : Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019				236.250.000
		Tersusunnya Dokumen Rancang Lanskap Kampung Tematik	Dokumen	1	
		Terlaksananya lomba kreatifitas inovasi di Kota Bogor	Kegiatan	20	
Misi 3 : Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel					
11	Program Program Peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP Bappeda	Nilai	84	25.127.000
11.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				25.127.000
		Tersusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2024	Dokumen	1	
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Dokumen	1	
		Tersusunnya LKIP	Dokumen	1	
		Tersusunnya LKPJ	Dokumen	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersusunnya LPPD	Dokumen	1	
12	Program : Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	%	100	2.957.319.100
12.1	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Tangga OPD				2.957.319.100
		Honorarium Pegawai PNS	OB	24	
		Honorarium Pegawai Non PNS(Supir)2 Orang	OP	24	
		Belanja Alat Tulis Kerja	Paket	1	
		Belanja Cetak dan Penjilidan	Buah	12	
		Belanja Listrik dan Elektronik	Buah	12	
		Pembayaran Listrik	Bulan	12	
		Belanja Surat Kabar	Bulan	12	
		Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12	
		Telepon	Bulan	12	
		Belanja Makan Minum Tamu	Orang	1161	
		Belanja Makan dan Minum Rapat	Orang	11533	
		Belanja Peralatan Rumah Tangga	Buah	491	
		Belanja Dokumentasi dan Dekorasi	Buah	24	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Belanja Gas	Buah	6	
		Belanja bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas	Bulan	12	
		Pembayaran STNK	Unit	34	
		Pengadaan Jasa Keamanan	Paket	1	
		Pengadaan Jasa Kebersihan	Paket	1	
13	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	100	1.539.250.000
13.1	Kegiatan : Pengadaan Inventaris Kantor				648.000.000
		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	OB	4	
		BM.Gorden	M	110	
		BM.Lemari Arsip	Unit	3	
		BM.Mesin Penghancur	Unit	5	
		BM.TV Digital	Unit	1	
		BM.AC 2 PK AC	Unit	3	
		BM.Dispenser	Unit	3	
		BM.Microwave	Unit	2	
		BM.Kulkas	Unit	2	
		BM.Komputer PC	Unit	2	
		BM.Printer	Unit	4	
		BM.Monitor	Unit	4	
		BM.Laptop	Unit	3	
		BM.Meja Rapat	Unit	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		BM.Sound System	Unit	1	
		Printer Portable	Unit	6	
13.2	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Invenaris Kantor				891.250.000
		Tune UP	Unit	10	
		Ganti Oli mesin	Unit	10	
		Ganti Oli gardan dan perseneling	Unit	10	
		Suku Cadang Mobil	Unit	10	
		Pembelian Ban kendaraan	Unit	10	
		Terpeliharanya Mesin Penghancur Kertas	Unit	16	
		Terpeliharanya Tabung Pemadam kebakaran	Unit	10	
		Terpeliharanya AC	Unit	43	
		Terpeliharnya PC Komputer	Unit	50	
		Terpeliharnya Printer	Unit	50	
		Terpeliharanya Laptop	Unit	34	
		Terpeliharnya Mesin Foto Copy	Unit	1	
		Terpeliharanya Jaringan Listrik dan Telpon	Unit	2	
		Terpeliharanya Bangunan/Gedung Bappeda	Gedung	1	
		Jasa Konsultn Perencanaan	Dokumen	2	
		Jasa Konsultan Pengawas	Dokumen	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2019	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tertatanya Lingkungan Taman di Lingkungan Bappeda	Paket	1	

Tabel 6.2.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
1	Program : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Hasil Kelitbangan	Hasil Kelitbangan	10	583.178.400
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	2	
		Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	5,2	
		Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	%	7	
1.1	Kegiatan : Penguatan SIDA Kota Bogor				168.150.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	Jejaring	1	
		Sosialisasi HAKI Inovasi dan IGA	Sosialisasi	2	
		Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi	Video	3	
		Fasilitasi pendaftaran sertifikasi HAKI Inovasi	Paket	1	
1.2	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Ekonomi				129.875.000
		Tersedianya data, informasi dan arah strategis terkait pemulihan ekonomi Kota Bogor ditengah wabah COVID-19	Dokumen	1	
1.3	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya				176.226.000
		Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Dokumen	1	
1.4	Kegiatan : Kajian Lingkup Bidang Pembangunan				108.927.400
		Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	Dokumen	1	
2	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20:100	235.926.300
		Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1:100	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	6	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22	
2.1	Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)				211.482.800
		Dokumen Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan	Dokumen	1	
		Bahan Paparan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kecamatan	6	
		Bahan Sidang Kelompok Musrenbang Tingkat Kota	Bidang	4	
		Rekapitulasi Hasil Musrenbang	Dokumen	1	
		Terlaksananya Forum PD	Hari	10	
		Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kota	hari	1	
		Penghargaan terhadap Pelaksanaan Musrenbang Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penghargaan	4	
		Ikut serta Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional	Kali	2	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				24.443.500
		Rancangan RKPD Tahun 2021	Set	5	
		Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2021	Buku	10	
		Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020	Set	5	
		Peraturan Walikota tentang RKPD Perubahan Tahun 2020	Buku	10	
		Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA. 2021	Paket	1	
		Proposal usulan Bantuan Keuangan Provinsi, Pusat, Dll Perubahan TA. 2020	Paket	1	
3	Program : Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	73	24.443.500
3.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya				24.443.500
		Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	
		Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program : Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	2.370.000
4.1	Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Perumahan Permukiman				2.370.000
		Fasilitasi Pokja Sanitasi dan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman	Kegiatan	1	
		Kajian Evaluasi dan Perencanaan Sanimas Kota Bogor	Dokumen	1	
5	Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	
5.1	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan				46.144.000
		Dokumen Perencanaan Kota Sehat	Dokumen	1	
6	Program : Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90	46.144.000
6.1	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah				46.144.000
		Buku Data dan Analisa Indikator Pembangunan Daerah	Buku	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Berita Acara Analisa Kebutuhan Data Perencanaan	Naskah	1	
		Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Dikelola	Elemen Data	9216	
		Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	Dokumen	1	
7	Program : Pengendalian Pembangunan	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	80	12.100.000
7.1	Kegiatan : Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah				12.100.000
		Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen	1	
		Terlaksananya pengadaan Kalender Perencanaan 2020	Buah	180	
8	Program : Kerjasama Pembangunan	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	22.036.000
8.1	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR				22.036.000
		Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	Dokumen	1	
		Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	Kali	3	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Laporan pelaksanaan TJSLP/CSR	Dokumen	1	
9	Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	170.075.000
9.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD				170.075.000
		Tersusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Dokumen	1	
		Tersusunnya LKIP	Dokumen	1	
		Tersusunnya LKPJ	Dokumen	1	
		Tersusunnya LPPD	Dokumen	1	
		Terlaksananya Redesign dan Redevelopment Website Bappeda	Website	1	
		Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Dokumen	1	
10	Program : Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah	%	100	1.777.936.180
10.1	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Tangga OPD				1.777.936.180
		Honorarium Pegawai PNS	Bulan	12	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Honorarium Pegawai Non PNS (Supir)	Bulan	12	
		Belanja Alat Tulis Kerja	Paket	1	
		Pembayaran Listrik	Bulan	12	
		Belanja Surat Kabar	Bulan	12	
		Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12	
		Pembayaran Telepon	Bulan	12	
		Belanja Makan Dan Minum Rapat	Paket	1	
		Pembayaran STNK Roda 2	Unit	24	
		Pembayaran STNK Roda 4	Unit	10	
		Pengadaan Jasa Keamanan	Paket	1	
		Pengadaan Jasa Kebersihan	Paket	1	
		Capacity Building	Kegiatan	1	
11	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	1.170.770.000

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.1	Kegiatan : Pengadaan Inventaris Kantor				515.850.000
		Pengadaan Televisi LED	Unit	1	
		Mesin Sleding Door	Paket	1	
		Kursi Tamu/Sice	Set	1	
		Kursi Lipat	Set	1	
		Pengadaan Server	Unit	1	
		Kursi Sandaran Rendah	Buah	12	
		Kunci Pintu Digital (Digital Times and Attendance Acces Control System)	Unit	1	
		Lemari Arsip	Unit	4	
		Pengadaan Peralatan Video Conference	Unit	3	
11.2	Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor				654.920.000
		Renovasi Bappeda	Paket	1	
		Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1	
		Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan	
				Tahun 2020	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terpeliharanya Peralatan dan mesin	Paket	1	
		Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	10	
	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
12	Program 4.1.1 : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100	296.650.000
12.1	Kegiatan : Perencanaan Tata Ruang				192.935.000
		Dokumen Laporan Pendampingan	Dokumen	1	
12.2	Kegiatan : Pengembangan Informasi Geospasial				103.715.000
		Simtaru dan Simpul Jaringan	Sistem	1	

Tabel 6.3.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
Tahun 2021

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas					
1	Program : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Hasil Kelitbangan	Hasil Kelitbangan	10	1.496.817.400
		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	2	
		Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	5,2	
		Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat	%	7	
1.1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan	1	233.842.000
		Jumlah kampung tematik / kampung wisata	Dokumen	2	
1.1.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	132.552.000
		Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	Dokumen	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	101.290.000
		Tersusunnya dokumen ilustrasi perencanaan satu kampung tematik	Dokumen	1	
		Tersusunnya dokumen Lokasi-lokasi prioritas pembangunan kampung tematik	Dokumen	1	
1.2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Dokumen	1	1.012.415.400
1.2.1	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	600.135.400
		Tersusunnya Dokumen Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor	Dokumen	1	
1.2.2	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	412.280.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersusunnya Dokumen Kajian Kebersihan Lingkungan	Dokumen	1	
1.3	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan	Jumlah	66	250.560.000
		Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	Jumlah	54	
1.3.1	Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	7	225.560.000
		Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovasi	Video	2	
		Terfasilitasinya Jejaring Inovasi	Jejaring	1	
		Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2021	Lomba	1	
1.3.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	25.000.000
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	22:100	1.051.729.000
		Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	2:100	
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	7	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	23	
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90	
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10	
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%	85	
2.1	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Orang	1100	751.729.000
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) dan Sesuai Regulasi	Persen	100	
		Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program	17	
2.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	5	413.320.000
		Forum perangkat daerah RKPD	Berita Acara	1	
		Konsultasi publik RKPD	Berita Acara	1	
		Musrenbang RKPD Tingkat Kota	Berita Acara	1	
		Konsultasi publik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara	1	
		Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	6	256.209.000
		Perda Perubahan RPJMD tahun 2019-2024	Perda	1	
		Perkada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024	Perkada	1	
		Perkada Renja Perangkat Daerah	Perkada	1	
		Perkada perubahan Renja Perangkat Daerah	Perkada	1	
		Perkada RKPD	Perkada	1	
		Perkada RKPD Perubahan	Perkada	1	
2.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	32.200.000
		Malam Gebyar CSR/TJS LP	Kegiatan	1	
		Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJS LP	Dokumen	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.4	Sub Kegiatan : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	1	50.000.000
		Naskah Akademis Penyusunan Perubahan RPJMD 2019-2024	Dokumen	1	
2.2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data	9216	150.000.000
2.2.1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	150.000.000
		Buku Data dan Analisa Pembangunan Daerah	Dokumen	1	
2.3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	Jumlah	20	150.000.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	10	150.000.000
		Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi RKPD	Dokumen	4	
		Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi Bankeu dan DAK	Dokumen	4	
		Terlaksananya Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan	1	
		Tersusunnya Laporan Tahunan Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan	1	
3	Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	78	677.840.200
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	79	
		Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	77	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program Bidang Pemerintahan Umum yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	27	45.890.000
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Umum yang mencapai target	Jumlah	63	
		Jumlah Program Bidang Pemerintahan Wilayah yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	4	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Wilayah yang mencapai target	Jumlah	12	
		Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	22	
		Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mencapai target	Jumlah	54	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.1	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	19	3.150.000
		Tersusunnya Dokumen Monev Perencanaan Subid Pemerintahan	Laporan	1	
3.1.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	16.000.000
		Tersusunnya Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1	
		Tersusunnya Rekomendasi Program/ Kegiatan Konvergensi Stunting	Dokumen	1	
		Tersusunnya Rekomendasi Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1	
3.1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	26.740.000

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembinaan Forum Kota Sehat	Bulan	12	
		Rapat Koordinasi Kota Sehat	Kegiatan	2	
3.2	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Program Bidang Infrastruktur yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	10	631.950.200
		Jumlah Indikator Program Pembangunan Bidang Infrastruktur yang mencapai target	Jumlah	20	
		Jumlah Program Bidang Kewilayahan yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah	14	
		Jumlah Indikator Program Pembangunan Bidang Kewilayahan yang mencapai target	Jumlah	22	
3.2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	573.054.000
		Masterplan Utilitas	Dokumen	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	6.410.400
		Tersusunnya Dokumen Pengadaan Masterplan Air Limbah (KAK, HPS, RKS)	Dokumen	1	
3.2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	52.485.800
		Dokumen RAD GRK	Dokumen	1	
4	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point	BB	13.873.640.204
		Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	Persen	90	
		Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	85	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Bappeda secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	299.650.000
4.1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	200.000.000
		Tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024	Dokumen	1	
		Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda	Dokumen	1	
		Renja Perubahan	Dokumen	1	
4.1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	10.000.000
		Tersusunnya Dokumen LKIP	Dokumen	1	
		Tersusunnya Dokumen LKPJ	Dokumen	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersusunnya Dokumen LPPD	Dokumen	1	
4.1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	89.650.000
		Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko Bappeda	Dokumen	1	
		Peningkatan Pelayanan Bappeda	Dokumen	1	
4.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	10.803.044.890
4.2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	10.803.044.890
		ASN Penerima Gaji	Orang/Bulan	45	
		Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	89.716.000
4.3.1	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	89.716.000
		Capacity Building	Kegiatan	1	
4.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	Persen	100	745.830.250
4.4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.347.700
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	Paket	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	87.364.400
		Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kerja	Tahun	1	
4.4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.537.350
		Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Paket	1	
4.4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.252.000
		Belanja Air Minum Pegawai	Galon	900	
		Terpenuhinya Kebutuhan Gas	Tabung	6	
4.4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	41002	49.507.800

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bahan Dekorasi	Paket	1	
		Terpenuhinya Kebutuhan Cetak	Paket	1	
		Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan	Lembar	41000	
4.4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12.000.000
		Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar/Majalah	Bulan	12	
4.4.7	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	19.590.000
		Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	Orang	50	
4.4.8	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	540.231.000
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Paket	1	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman pelatihan/ Sosialisasi/ Bimtek/ Seminar / Lokakarya	Paket	1	
		Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1	
4..5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	Persen	85	494.204.700
4.5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	22	494.204.700
		Jumlah Pengadaan AC	Unit	2	
		Jumlah Pengadaan Dispenser	Unit	2	
		Jumlah Pengadaan Komputer PC	Unit	4	
		Jumlah Pengadaan Laptop	Unit	4	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Pengadaan Penghancur Kertas	Unit	2	
		Jumlah Pengadaan Printer	Unit	6	
		Jumlah Pengadaan Scanner	Unit	2	
4.6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional	Persen	100	960.091.064
4.6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	167.999.536
		Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12	
		Pembayaran Listrik	Bulan	12	
		Pembayaran Telepon	Bulan	12	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	21	792.091.528
		Pemenuhan Jasa Keamanan	Orang	4	
		Pemenuhan Jasa Kebersihan	Orang	4	
		Pemenuhan Tenaga Administrasi	Orang	12	
		Pemenuhan Tenaga Angkut/Supir	Orang	1	
4.7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKBMD pemeliharaan	Persen	85	481.103.300
4.7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	56	243.991.300

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembayaran STNK Kendaraan Roda 2	Unit	24	
		Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4	Unit	10	
		Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	10	
		Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Gas	Bulan	12	
4.7.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	132.150.000
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Paket	1	
4.7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	104.962.000
		Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1	
		Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda	Paket	1	
		Renovasi Bappeda	Paket	1	
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera					

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	
				Tahun 2021	
				Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100	

Tabel 6.4.
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pendanaan Pembangunan
Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																			
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif			Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630								Bappeda	Kota Bogor	
										Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor
	Sasaran 1.1. : Meningkatkan kreativitas, inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah		Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630								Bappeda	Kota Bogor	
										Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor		
			Indeks Kualitas Kebijakan	Kategori	NA	NA	NA	NA	NA		Sedang		Sedang		Sedang		Bappeda	Kota Bogor	
					%	0	50	50	60	50		50		50		50		Bappeda	Kota Bogor
		Program 1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	0	50	50	60	50		50		50		50		Bappeda	Kota Bogor
				Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%					68		69		70		70		Bappeda	Kota Bogor
				Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%					36		38		40		40		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 1.1.1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil litbang bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan			1		1	470	1		1	1050	3	1520	Bappeda	Kota Bogor
		Sub Kegiatan 1.1.1.1.1. : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			1		2	370	1	50	1	670	5	1090		
			Tersedianya data dan informasi Standarisasi Gedung Pemerintahan Kota Bogor.	Dokumen									1					
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis perubahan batas wilayah Kota Bogor	Dokumen			1											
			Dokumen kajian pembangunan wilayah Kota Bogor dari aspek Sosial, ekonomi dan budaya	Dokumen					2									
			Tersusunnya Kajian Pemerintahan Umum	Dokumen								1						

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 1.1.1.1.2. : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, reformasi Birokrasi	Laporan									1	280	1	280			
			Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Laporan										1					
		Sub Kegiatan 1.1.1.1.3. : Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi						1	100			1	100	1	200		
			Tersusunnya Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan							1				1					
		Kegiatan 1.1.1.2. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan				1	1			1	880			3	880	Bappeda	Kota Bogor
		Sub Kegiatan 1.1.1.2.6. : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen								1	580			1	580		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 1.1.1.3. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Dokumen			2	2	1	700	2	1260	1	400	6	2360	Bappeda	Kota Bogor
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.2. : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen			1								1			
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan rumah hunian di Kota Bogor	Dokumen			1											
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.3. : Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen			1	1					1	400	3	400		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kajian Risiko Bencana dan Penanggulangan Risiko Bencana	Dokumen					1		1								
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.4. : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen							1	100			1	100			
			Kajian Penyusunan Dokumen Pengelolaan Agroforestri	Dokumen								1							
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.6. : Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen							1	300			1	300			
			Tersusunnya Kajian tentang Transportasi	Dokumen								1							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.7. : Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen							1	460			1	460			
			Kajian Ketersediaan ruang terbuka hijau dari aspek jasa lingkungan	Dokumen							1								
		Sub Kegiatan 1.1.1.3.8. : Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen								1	150			1	150		
			Kajian Digitalisasi Arsip untuk menuju Arsip Digital di Kota Bogor	Dokumen								1							
		Kegiatan 1.1.1.4. : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan	Jumlah		1	5	4	68	810	70	620	72	475	72	1905	Bappeda	Kota Bogor	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	Jumlah					59		64		69		69		Bappeda	Kota Bogor	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Gebyar Inovasi	Kegiatan			1	1			1		1					
			Sosialisasi HAKI Inovasi, Lomba Inovasi dan IGA	Kegiatan			2	3	1									
		Sub Kegiatan 1.1.1.4.3. : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan			1	1	1	35	1	75	1	35	5	145		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan			1	1	1		1		1					
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang sejahtera																		
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif			Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630						641 - 650		Bappeda	Kota Bogor
									Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor
	Sasaran 1.1. : Meningkatkan kreativitas,			Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630					641 - 650		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah								Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor
		Program 1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2	2	2		2		2		2		Bappeda	Kota Bogor
		Kegiatan 1.1.1.2. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kampung tematik /kampung wisata	Dokumen		1	1	1	2	150	2	220	2	253	2	623		
		Sub Kegiatan 1.1.1.2.1. : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		1	1	1	1	150	3	220	2	253	8	623		
			Tersusunnya Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dokumen							1		1					
			Kajian wisata berbasis komunitas	Dokumen							1							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tersusunnya dokumen rancang lansekap kampung tematik	Dokumen		1			1		1		1						
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																			
Tujuan 2 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang Partisipatif, Holistik, Sinergis, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Nilai					80,01		81		82		82				
			Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22,9	23,35	23,75	24		25		26		26				
	Sasaran 2. 1 : Meningkatkan capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22,9	23,35	23,75	24		25		26		26				
			Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	61,11	64,82	74,91	90						100				
									69		71		73		73				

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
									12		12		12		12				
			Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	75	61,11	64,82	74,91	90						100				
									69		71		73		73				
		Kegiatan 2.1.1.1. : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen						100	785	100	1875	100	2130	100	4790		
			Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Orang						2000		2300		2500		2500			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program					17									
		Sub Kegiatan 2.1.1.1.1. : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara		1	1	2			1	110	1	120	1	230		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	NA	1	1	2			1		1					
		Sub Kegiatan 2.1.1.1.2. : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	4	4	4	4			1	50	1	60	1	110		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1			1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 2.1.1.1.1. : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	3	2	2	6	260	5	915	6	950	9	2125		
			Perda Perubahan RPJPD tahun 2025-2050	Perda									1					
			Perda RPJMD tahun 2025-2029	Perda									1					
			Perda Perubahan RPJMD tahun 2019-2024	Perda					1									
			Perkada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024	Perkada					1									
			Perkada Renja Perangkat Daerah	Perkada	1	1	1	1	1		1		1					
			Perkada perubahan Renja Perangkat Daerah	Perkada	1	1	1	1	1		1		1					
			Perkada RKPD	Perkada	1	1	1	1	1		1		1					
			Perkada RKPD Perubahan	Perkada	1	1	1	1	1		1		1					
			Dokumen Teknokratik RPJPD Tahun 2025-2050	Dokumen								1						

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 2.1.1.1.2. : Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen		2	2	2	3	125					3	125		
			Malam Gebyar CSR/TJSLP	Kegiatan					1									
			Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJSLP	Dokumen		1	1	1	1									
			Fasilitasi dan temu pelaku usaha pada forum csr/tjslp	Kegiatan		1	1	1	1									
			Sub Kegiatan 2.1.1.1.3. : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen				1							1		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara				1										
			Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029	Berita Acara									1					
			Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2050	Berita Acara									1					
		Kegiatan 2.1.1.3. : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data	9216	9216	9216	9216	9216	260					9216	260		
		Sub Kegiatan 2.1.1.3.1. : Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	1	1	1	2	260					2	260		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Masukan Data dan Analisa Pembangunan Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1									
			Tersusunnya Masukan Penyelenggaraan Forum Data	Kegiatan				1	1									
		Kegiatan 2.1.1.2. : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data											9216			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Jumlah elemen data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Elemen Data						5		5		5		5			
		Sub Kegiatan 2.1.1.2.1. : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen								2	350	2	360	2	710		
			Tersusunnya Data dan Analisa Pembangunan Daerah	Kegiatan								1		1					
			Penyelenggaraan Forum Data	Kegiatan								1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 2.1.1.4. : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	Jumlah					21	150	22	700	23	740	23	1590		
			Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program							18		19		19			
		Sub Kegiatan 2.1.1.4.1. : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	1	1	11	150	13	500	11	520	13	1170		
			Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi RKPD	Dokumen	1	1	1	1	4		4		4					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi Bankeu dan DAK	Dokumen	1	1	1	1	4		4		4					
			Terlaksananya Asistensi Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Kegiatan			1	1	1		1		1					
			Terlaksananya Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan				1	1		1		1					
			Tersusunnya Laporan Tahunan Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan			1	1	1		1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan			1	1			1								
			Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	Laporan							1								
		Sub Kegiatan 2.1.1.4.2. : Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama								1	200	1	220	1	420		
			Malam Gebyar CSR/TJSLP	Kegiatan								1		1					
			Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJSLP	Dokumen								1		1					

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									69		71		73		73			
		Kegiatan 3.1.2.1. : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program Bidang Pemerintahan Umum yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					44	1050	46	250	47	365	47	1665		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Umum yang mencapai target	Jumlah					91		94		96		96			
			Jumlah Program Bidang Pemerintahan Wilayah yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					24		25		26		26			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Wilayah yang mencapai target	Jumlah					38		38		40		40			
			Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					25		27		28		28			
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mencapai target	Jumlah					52		54		55		55			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 3.1.2.2.3. : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah							19	50	19	55	19	105			
			Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan Subid Pemerintahan Umum	Laporan								1		1					
			Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan Subid Pemerintahan Wilayah	Laporan								1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 3.1.2.3.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	130	3	100	1	200	7	430		
			Tersusunnya Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen							1							
			Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPKD	Kegiatan					1									
			Revisi RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024	Dokumen					1									
			Tersusunnya Rekomendasi Program/Kegiatan Konvergensi Stunting	Dokumen				1			1		1					
			Tersusunnya Rekomendasi Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1	1	1	1			1							

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 3.1.2.2. : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					45	500	46	1200	48	100	48	1800		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang mencapai target	Jumlah					54		55		56		56			
		Sub Kegiatan 3.1.2.2.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen							1	600			1	600		
			Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Dokumen								1						

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 3.1.2.2.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					1	500	1	600	1	100	3	1200			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen										1					
			Review Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dokumen					1										
			Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen								1							

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung g Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 3.1.2.3. : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Program Bidang Infrastruktur yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					12	1350	12	2700	12	1485	12	5535		
			Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang mencapai target	Jumlah					23		23		24		24			
			Jumlah Program Bidang Kewilayahan yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					5		5		6		6			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 3.1.2.4.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	1	1	1	500	1	600	1	600	5	1700			
			Tersusunnya Dokumen strategi sanitasi kota	Dokumen		1	1						1						
			Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen				1											
			Review Masterplan Air Limbah	Dokumen								1							
			Masterplan Ruang terbuka hijau	Dokumen										1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									A		A		A		A			
			Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,34	3,17	3,4		3,4		3,5		3,5			
		Kegiatan 3.2.1.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100		100		100		100	300		
		Sub Kegiatan 3.2.1.1.1. : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3	3	2	100	5	200	4	150	7	450		
			Tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024	Dokumen				1										
			Tersusunnya Renstra Bappeda Tahun 2025-2029	Dokumen									1					
			Tersusunnya Dokumen Renja Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1		1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024							
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Renja Perubahan	Dokumen	1	1	1	1	1		1		1		1					
			Laporan Pengembangan Website Bappeda	Dokumen				1				1								
			Laporan Penyusunan Video Profil Bappeda	Dokumen								1								
			Laporan Forum PD Bappeda	Dokumen								1		1						
		Sub Kegiatan 3.2.1.1.2. : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	3	30	5	100	3	140	5	270				
			Tersusunnya Dokumen LKIP	Dokumen	1	1	1	1	1			1		1		1				
			Tersusunnya Dokumen LKPJ	Dokumen	1	1	1	1	1			1		1		1				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Tersusunnya Dokumen LPPD	Dokumen	1	1	1	1	1		1		1						
			Tersusunnya Dokumen LKPJ AMJ Tahun 2019-2024	Dokumen	1	1	1	1			1								
			Tersusunnya Dokumen PMPRB Bappeda	Dokumen							1		1						
		Sub Kegiatan 3.2.1.1.3. : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	2	2	2	170	2	110	1	120	4	400			
			Peningkatan Reformasi Birokrasi Bappeda	Dokumen					1										
			Tersusunnya Dokumen Analisis Risiko Bappeda	Dokumen	1	1	1	1	1				1						
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelayanan Bappeda	Laporan			1	1			1								
			Tersusunnya Dokumen Maturitas SPIP Bappeda	Laporan							1								
		Kegiatan 3.2.1.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persen	100	100	100	100	100	14200	100	12980	100	14558	100	41738			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 5.01.01.2.02.01 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	45	45	45	46	14200	46	12900	46	14500	46	41600			
			ASN Penerima Gaji	Orang/Bulan	45	45	45	45	46		46		46						
			Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	45	45	45	46		46		46						
		Sub Kegiatan 5.01.01.2.02.05 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan								1	30	1	33	1	63		
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan								1		1					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 5.01.01.2.02.07 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan							17	50	17	25	17	75		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan							17		17					
		Kegiatan 3.2.1.4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen			1	1	100	0	100	75	100	175	100	250		
		Sub Kegiatan 3.2.1.4.1. : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket								1	65	1	65	1	130	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket							1		1						
		Sub Kegiatan 3.2.1.4.3. : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen								1	10	1	10	1	20		
			Tersusunnya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen								1		1					
		Sub Kegiatan 3.2.1.4.5. : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			1	1						75	100	1	100		
			Capacity Building	Kegiatan			1	1						75					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Kegiatan 3.2.1.5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	1719	100	1906	100	1965	100	5590		
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.1. : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	17	1	20	1	22	1	59		
			Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik	Paket	1	1	1	1	1		1		1					
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.2. : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	100	1	150	1	150	1	400		
			Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kerja	Tahun	1	1	1	1	1	1		1		1				

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.3. : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	11	1	50	1	50	1	111		
			Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.4. : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				1	6	25	6	26	6	27	6	78		
			Belanja Air Minum Pegawai	Galon				900	900		900		900					
			Terpenuhinya Kebutuhan Gas	Tabung					12		12		12					
			Jeruk Medan	Kilo					12		12		12					
			Kacang Mede	Kilo					12		12		12					
			Kue Kering Kastengel	Kilo					12		12		12					
			Kue Kering Nastar	Kilo					12		12		12					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.5. : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	3	3	3	50	3	60	3	66	3	176		
			Bahan Dekorasi	Paket	1	1	1	1	1		1		1					
			Terpenuhinya Kebutuhan Cetak	Paket	1	1	1	1	1		1		1					
			Terpenuhinya Kebutuhan Penggandaan	Lembar	42000	42000	42000	42000	42000		42000		42000					
		Sub Kegiatan 3.2.1.5.6. : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	1	16	1	50	1	50	1	116		
			Terpenuhinya Kebutuhan Surat Kabar/Majalah	Bulan	12	12	12	2	12		12		12					

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	Paket	1	1	1	1	1		1		1					
		Kegiatan 3.2.1.6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan BMD sesuai RKBMD	Persen	95	100	80	85	90	490	95	1785	100	580		2855		
		Sub Kegiatan 3.2.1.6.1. : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5						2	1200			1	1200		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5						2							
		Sub Kegiatan 3.2.1.6.2. : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	118	1	18	0	20	40	30	75	30	80	5	195		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Mesin tik elektrik	Unit	3													
			Microwave	Unit		2												
			Kulkas	Unit		2												
		Kegiatan 3.2.1.7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah	Persen				100	100	1385	100	1598	100	1738	100	4721		
		Sub Kegiatan 3.2.1.7.2. : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3	3	3	185	3	198	3	198	3	581		
			Pembayaran Air/PDAM	Bulan	12	12	12	12	12		12		12					
			Pembayaran Listrik	Bulan	12	12	12	12	12		12		12					
			Pembayaran Telepon	Bulan	12	12	12	12	12		12		12					

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Sub Kegiatan 3.2.1.7.3. : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	3	4	4	1200	4	1.400	4	1.540	4	4140		
			Pemenuhan Jasa Keamanan	Orang	4	4	4	4	4		4		4					
			Pemenuhan Jasa Kebersihan	Orang	4	4	4	4	4		4		4					
			Pemenuhan Tenaga Administrasi	Orang				12	21		21		21					
			Pemenuhan Tenaga Angkut/Supir	Orang	1	1	1	1	1		1		1					
		Kegiatan 3.2.1.8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	Persen				90	90	610	95	1075	100	680	100	2365		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Sub Kegiatan 3.2.1.8.1. : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	34	34	34	34	34	350	34	325	34	350	34	1025			
			Pembayaran STNK Kendaraan Roda 2	Unit	24	24	24	24	24		24		24						
			Pembayaran STNK Kendaraan Roda 4	Unit	10	10	10	10	10		10		10						
			Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	10	10	10	10	10		10		10						
			Terpenuhiya kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Gas	Bulan	12	12	12	12	12		12		12						
			Sub Kegiatan 3.2.1.8.3. : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				133	133	150	133	150	133	165	133	465		
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	Unit				133	133		133		133						

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Kota Bogor tahun 2019-2024 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Bogor telah menentukan Program unggulan sebagai berikut :

Tabel 6.5.
Perubahan Program Unggulan Bappeda Kota Bogor

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630								Bappeda	Kota Bogor
								Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda
	Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630								Bappeda	Kota Bogor
								Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda
	Indeks Kualitas Kebijakan	Kategori	NA	NA	NA	NA	NA		Sedang		Sedang		Sedang		Bappeda	Kota Bogor
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	0	50	50	60	50		50		50		50		Bappeda	Kota Bogor

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Program 1.1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	0	50	50	60	50		50		50		50		Bappeda	Kota Bogor
	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%					68		69		70		70		Bappeda	Kota Bogor
	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%					36		38		40		40		Bappeda	Kota Bogor
Kegiatan 1.1.1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil litbang bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan			1		1	470	1		1	1050	3	1520	Bappeda	Kota Bogor
Sub Kegiatan 1.1.1.1.1.1. : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan			1		2	370	1	50	1	670	5	1090		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersedianya data dan informasi Standarisasi Gedung Pemerintahan Kota Bogor.	Dokumen									1					
	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis perubahan batas wilayah Kota Bogor	Dokumen			1											
	Dokumen kajian pembangunan wilayah Kota Bogor dari aspek Sosial, ekonomi dan budaya	Dokumen					2									
	Tersusunnya Kajian Pemerintahan Umum	Dokumen							1							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 1.1.1.1.2. : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan									1	280	1	280		
	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Laporan									1					
Sub Kegiatan 1.1.1.1.3. : Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi					1	100			1	100	1	200		
	Tersusunnya Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan						1				1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan 1.1.1.2. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklajuti jadi kebijakan	Hasil Kelitbangan			1	1			1	880			3	880	Bappeda	Kota Bogor
Sub Kegiatan 1.1.1.2.6. : Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen							1	580			1	580		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen							1							
Sub Kegiatan 1.1.1.2.7. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen			1	1			2	300			4	300		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Ketahanan Keluarga	Dokumen			1				1							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Dokumen							1							
	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	Dokumen				1										
Kegiatan 1.1.1.3. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	Dokumen			2	2	1	700	2	1260	1	400	6	2360	Bappeda	Kota Bogor
Sub Kegiatan 1.1.1.3.2. : Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen			1								1			

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 1.1.1.3.3. : Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen				1	1	700	1	250			3	950		
	Tersusunnya Dokumen Kajian Kebersihan Lingkungan	Dokumen				1										
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kajian Risiko Bencana dan Penanggulangan Risiko Bencana	Dokumen					1		1							
Sub Kegiatan 1.1.1.3.4. : Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen							1	100			1	100		
	Kajian Penyusunan Dokumen Pengelolaan Agroforestri	Dokumen							1							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 1.1.1.3.6. : Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen							1	300			1	300		
	Tersusunnya Kajian tentang Transportasi	Dokumen							1							
Sub Kegiatan 1.1.1.3.7. : Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen							1	460			1	460		
	Kajian Ketersediaan ruang terbuka hijau dari aspek jasa lingkungan	Dokumen							1							
Sub Kegiatan 1.1.1.3.8. : Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen							1	150			1	150		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kajian Digitalisasi Arsip untuk menuju Arsip Digital di Kota Bogor	Dokumen							1							
Kegiatan 1.1.1.4. : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan dan berkelanjutan	Jumlah		1	5	4	68	810	70	620	72	475	72	1905	Bappeda	Kota Bogor
	Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat	Jumlah					59		64		69		69		Bappeda	Kota Bogor
Sub Kegiatan 1.1.1.4.1. : Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen					1	125					1	125		
	Tersusunnya Road Map SIDA Kota Bogor	Dokumen					1									
Sub Kegiatan 1.1.1.4.2. : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan		2	6	5	8	650	2	545	2	440	26	1635		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Teselenggaranya Lomba Kreativitas Inovasi Kota Bogor/Bogor Innovation Award	Laporan		1	1	1	1		1		1					
	Pembuatan Bulletin Litbang	Buletin			1		4									
	Pembuatan Video Inovasi (video)	Video			3	2	2									
	Gebyar Inovasi	Kegiatan			1	1			1		1					
	Sosialisasi HAKI Inovasi, Lomba Inovasi dan IGA	Kegiatan			2	3	1									
Sub Kegiatan 1.1.1.4.3. : Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan			1	1	1	35	1	75	1	35	5	145		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan			1	1	1		1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630						641 - 650		Bappeda	Kota Bogor
							Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor
	Kategori Inovasi Daerah	Kategori					621 - 630						641 - 650		Bappeda	Kota Bogor
							Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		Bappeda	Kota Bogor
Program 1.1.1.1. : Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2	2	2		2		2		2		Bappeda	Kota Bogor
Kegiatan 1.1.1.2.1. : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kampung tematik /kampung wisata	Dokumen		1	1	1	2	150	2	220	2	253	2	623		
Sub Kegiatan 1.1.1.2.1.1. : Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		1	1	1	1	150	3	220	2	253	8	623		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dokumen							1		1					
	Kajian wisata berbasis komunitas	Dokumen							1							
	Tersusunnya dokumen rancang lansekap kampung tematik	Dokumen		1			1		1		1					
	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Nilai					80,01		81		82		82			
	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22,9	23,35	23,75	24		25		26		26			

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22,9	23,35	23,75	24		25		26		26			
	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	61,11	64,82	74,91	90						100			
							69		71		73		73			
Program 2.1.1. : Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22,9	23,35	23,75	24	1195	25	2575	26	2870	26	6640		
	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	5	11	18	8						10			
							20		23		25		25			

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	100	100	100	95		95		100		100			
	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24	40,62	19,34	26,02	10									
							12		12		12		12			
	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	75	61,11	64,82	74,91	90						100			
69								71		73		73				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan 2.1.1.1. : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen					100	785	100	1875	100	2130	100	4790		
	Jumlah Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Orang					2000		2300		2500		2500			
	Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program					17									
Sub Kegiatan 2.1.1.1.1. : Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara		1	1	2			1	110	1	120	1	230		
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	NA	1	1	2			1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 2.1.1.1.2. : Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	4	4	4	4			1	50	1	60	1	110		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	1	1			1		1					
Sub Kegiatan 2.1.1.1.1. : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	3	2	2	6	260	5	915	6	950	9	2125		
	Perda Perubahan RPJPD tahun 2025-2050	Perda									1					
	Perda RPJMD tahun 2025-2029	Perda									1					
	Perda Perubahan RPJMD tahun 2019-2024	Perda					1									
	Perkada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024	Perkada					1									
	Perkada Renja Perangkat Daerah	Perkada	1	1	1	1	1		1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 2.1.1.1.3. : Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen				1							1			
	Naskah Akademis Penyusunan Perubahan RPJMD 2019-2024	Dokumen				1										
Sub Kegiatan 3.1.1.1.6. : Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	1	1	3	400	3	800	5	1000	7	2200		
	Forum perangkat daerah RKPD	Berita Acara	1	1	1	1	1		1		1					
	Konsultasi publik RKPD	Berita Acara		1	1	1	1		1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Musrenbang RKPD Tingkat Kota	Berita Acara	1	1	1	1	1		1		1					
	Konsultasi publik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara				1										
	Musrenbang Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Berita Acara				1										
	Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029	Berita Acara									1					
	Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2050	Berita Acara									1					
Kegiatan 2.1.1.3. : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data	9216	9216	9216	9216	9216	260					9216	260		

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan 2.1.1.2. : Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Data											9216			
	Jumlah elemen data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Elemen Data					5		5		5		5			
Sub Kegiatan 2.1.1.2.1. : Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen							2	350	2	360	2	710		
	Tersusunnya Data dan Analisa Pembangunan Daerah	Kegiatan							1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penyelenggaraan Forum Data	Kegiatan							1		1					
Kegiatan 2.1.1.4. : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai	Jumlah					21	150	22	700	23	740	23	1590		
	Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	Program							18		19		19			
Sub Kegiatan 2.1.1.4.1. : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	1	1	11	150	13	500	11	520	13	1170		

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi RKPD	Dokumen	1	1	1	1	4		4		4					
	Tersusunnya Laporan Triwulanan Realisasi Bankeu dan DAK	Dokumen	1	1	1	1	4		4		4					
	Terlaksananya Asistensi Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Kegiatan			1	1	1		1		1					
	Terlaksananya Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan				1	1		1		1					
	Tersusunnya Laporan Tahunan Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan			1	1	1		1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024	Laporan			1	1			1							
	Tersusunnya Laporan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	Laporan							1							
Sub Kegiatan 2.1.1.4.2. : Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama							1	200	1	220	1	420		
	Malam Gebyar CSR/TJSLP	Kegiatan							1		1					
	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR/TJSLP	Dokumen							1		1					

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							69		71		73		73			
Kegiatan 3.1.2.1. : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Program Bidang Pemerintahan Umum yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					44	1000	46	150	47	365	47	1515		
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Umum yang mencapai target	Jumlah					91		94		96		96			
	Jumlah Program Bidang Pemerintahan Wilayah yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					24		25		26		26			

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Wilayah yang mencapai target	Jumlah					38		39		40		40			
	Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					25		27		28		28			
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mencapai target	Jumlah					52		54		55		55			

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 3.1.2.2.3. : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan							19	50	19	55	19	105		
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan Subid Pemerintahan Umum	Laporan							1		1					
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan Subid Pemerintahan Wilayah	Laporan							1		1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 3.1.2.3.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					3	130	3	100	1	200	8	430		
	Tersusunnya Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen							1							
	Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPKD	Kegiatan					1									
	Revisi RAD Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024	Dokumen					1									
	Tersusunnya Rekomendasi Program/Kegiatan Konvergensi Stunting	Dokumen				1			1		1					
	Tersusunnya Rekomendasi Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1	1	1	1			1							

[illegible]

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian				Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Kegiatan 3.1.2.2. : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					45	500	46	1200	48	100	48	1800			
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang mencapai target	Jumlah					54		55		56		56				
Sub Kegiatan 3.1.2.2.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen							1	600			1	600			
	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca	Dokumen							1								

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 3.1.2.2.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen					1	500	1	600	1	100	3	1200		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen									1					
	Review Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dokumen					1									
	Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen							1							

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan 3.1.2.3. : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Jumlah Program Bidang Infrastruktur yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					12	1350	12	2700	12	1485	12	5535		
	Jumlah Indikator Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang mencapai target	Jumlah					23		23		24		24			
	Jumlah Program Bidang Kewilayahan yang selaras dengan RPJPD/RPJMD/RKPD	Jumlah					5		5		6		6			

[illegible]

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 3.1.2.4.1. : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		1	1	1	1	500	1	600	1	600	5	1700		
	Tersusunnya Dokumen strategi sanitasi kota	Dokumen		1	1						1					
	Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen				1										
	Review Masterplan Air Limbah	Dokumen							1							
	Masterplan Ruang terbuka hijau	Dokumen									1					

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan tahun ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
			2018	2019	2020	2021	2022		2023		2024					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan 3.1.2.4.4. : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		1	1		1	150	1	150	2	385	5	685		
	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	Laporan		1	1				1		1					
	Pedoman implementasi bangunan hijau dan lingkungan berkelanjutan	Laporan									1					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Untuk dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Indikator kinerja Bappeda Kota Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagaiberikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor									
1	Kategori Inovasi daerah		Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda									
2	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
3	Indeks Kualitas Kebijakan	Kategori	-	-	-	Sedang	Sedang	Baik	Baik
4	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	-	5,2	10,5	-	-	-	-
5			-	-	-	50	50	50	50
6	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
7	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	80	85	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
				-	-	69	71	73	73
8	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	80,01	81	82	82
Indikator Tujuan Bappeda									
9	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
10	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	81	82	82
11	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
Indikator Sasaran Bappeda									
12	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
13	Indeks Kualitas Kebijakan	Kategori	-	-	-	Sedang	Sedang	Baik	Baik
14	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	-	5,2	10,5	-	-	-	-
			-	-	-	50	50	50	50

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
15	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
16	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	80	85	-	-	-	-
				-	-	69	71	73	73
17	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	80,01	81	82	82
Indikator Program									
18	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	-	5,2	10,5	-	-	-	-
			-	-	-	50	50	50	50
19	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%	-	-	-	68	69	70	70
20	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%	-	-	-	36	38	40	40
	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	-	2	2	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
21	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
22	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	80	85	-	-	-	-
				-	-	69	71	73	73
23	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	6	7	-	-	-	-
				-	-	20	23	25	25
24	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90	90	95	95	100	100
25	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24	10	10	-	-	-	-
				-	-	12	12	12	12
26	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
27	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
28	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
29	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
30	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	%	-	-	-	69	71	73	73
31	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	%	-	-	-	69	71	73	73
32	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	-	-	-	69	71	73	73
33	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	-	69	71	73	73

No	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	2024
34	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Poin	B	B	BB	A	A	A	A
35	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,31	-	-	3,4	3,4	3,5	3,5

Selain indikator kinerja Bappeda Kota Bogor sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan Bappeda dalam urusan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bappeda Kota Bogor

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Kinerja Kunci (IKK)									
	FOKUS PENUNJANG URUSAN								
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	-	-	1	-	-	1
8	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	5
9	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	100	100	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan	Persen	100	100	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
3	Penerapan SIDA : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73.68	75	55,56	58,33	61,11	63,89	63,89
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	71,65	73	75	77	77
Indikator Kinerja Tujuan Bappeda									
5	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
6	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Indeks	-	-	-	80,01	81	82	82
7	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
Indikator Kinerja Sasaran Bappeda									
8	Kategori Inovasi Daerah	Kategori	Inovatif	-	-	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
9	Indeks Kualitas Kebijakan	Kategori	-	-	-	Sedang	Sedang	Baik	Baik
10	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	-	5,2	10,5	-	-	-	-
			-	-	-	50	50	50	50
11	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
12	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	80	85	-	-	-	-
				-	-	69	71	73	73
13	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	80,01	81	82	82
Indikator Kinerja Program									
14	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	-	5,2	10,5	-	-	-	-
			-	-	-	50	50	50	50
15	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%	-	-	-	68	69	70	70

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
16	Persentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%	-	-	-	36	38	40	40
17	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	-	2	2	2	2	2	2
18	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21	22	23	24	25	26	26
19	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	75	80	85	-	-	-	-
				-	-	69	71	73	73
20	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5	6	7	-	-	-	-
				-	-	20	23	25	25
21	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85	90	90	95	95	100	100
22	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24	10	10	-	-	-	-
				-	-	12	12	12	12
23	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
				-	-	79	82	85	
24	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
25	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
26	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	-	73	78	-	-	-	-
				-	-	79	82	85	85
27	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia	%	-	-	-	69	71	73	73

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	2020	2021	2022	2023	2024	
28	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	%	-	-	-	69	71	73	73
29	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	-	-	-	69	71	73	73
30	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	-	69	71	73	73
31	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Poin	B	B	BB	A	A	A	A
32	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Poin	3,31	-	-	3,4	3,4	3,5	3,5

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024 merupakan dasar pedoman yang digunakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bogor, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, maka perencanaan yang tercantum dalam Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Bappeda setiap tahunnya.

Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat Bappeda Kota Bogor.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Bappeda harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor dan Renstra Bappeda beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor. Demikian dokumen Renstra Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat khususnya bagi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor maupun bagi Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya.

WALI KOTA,

TTD

BIMA ARYA